

**EFEK MODERATOR AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN (STUDY KASUS BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PADA
KABUPATEN MAROS)**

TESIS
Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Manajemen



Oleh
HASRIYANI
NIM : 2017.MM.2.0895

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
STIE NOBEL INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
MAKASSAR
2019

**EFEK MODERATOR AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN (STUDY KASUS BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PADA
KABUPATEN MAROS)**

TESIS
Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Manajemen



Oleh
HASRIYANI
NIM : 2017.MM.2.0895

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
STIE NOBEL INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
MAKASSAR
2019**

PENGESAHAN TESIS

**EFEK MODERATOR AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
(STUDY KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PADA KABUPATEN MAROS)**

Oleh :

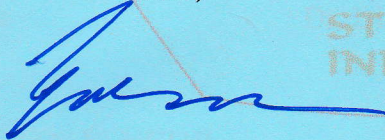
HASRIYANI

Telah dipertahankan di depan Penguji
Pada tanggal 10 Januari 2020
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

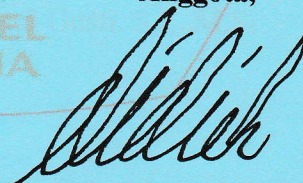
Komisi Pembimbing

Ketua,



Prof. Dr. H. Saban Echdar, S.E., M.Si

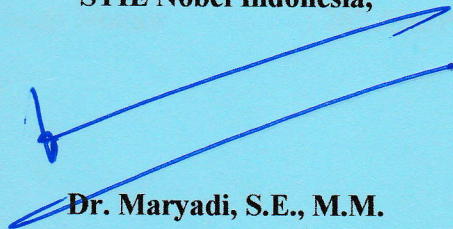
Anggota,



Dr. Didiek Handayani Gusti, S.E., M.Si

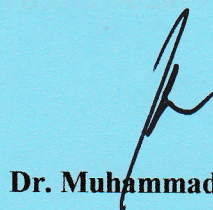
Mengetahui :

Direktur PPS
STIE Nobel Indonesia,



Dr. Maryadi, S.E., M.M.

Ketua Program Studi
Magister Manajemen,



Dr. Muhammad Idris, S.E., M.Si

**HALAMAN IDENTITAS
MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI**

JUDUL TESIS :

“ EFEK MODERATOR AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN (STUDY KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PADA KABUPATEN MAROS)”

Nama Mahasiswa : Hasriyani
NIM : 2017.MM.2.0895
Program Studi : Magister Manajemen
Peminatan : Manajemen Keuangan Daerah

KOMISI PEMBIMBING :

Ketua : Prof. Dr. H. Saban Echdar, S.E., M.Si
Anggota : Dr. Didiek Handayani Gusti, S.E.,M.Si

TIM DOSEN PENGUJI :

Dosen Penguji 1 : Dr. Salim S, S.E., M.M
Dosen Penguji 2 : Dr. Heri Sugeng Waluyo, S.E., M.M

Tanggal Ujian : 10 Januari 2020

SK Penguji Nomor : 262 /SK/PPS/STIE-NI/IX/2019

PERNYATAAN ORIGINALITAS DAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hasriyani

NIM : 2017.MM.2.0895

Tanggal Sidang : 10 Januari 2020

Judul : EFEK MODERATOR AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN (STUDY KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PADA KABUPATEN MAROS)

Tanggal Lulus : 10 Januari 2020

Menyatakan bahwa penulisan yang saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan dapat dipublikasikan sepenuhnya oleh PPS STIE Nobel Indonesia. Segala bentuk kutipan atau apapun itu telah sesuai dengan tata cara yang telah berlaku. Mengenai tulisan dan isi tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis, bukan PPS STIE Nobel Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan sebenar-benarnya.

Makassar, Januari 2020



(HASRIYANI)

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Robbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul 'uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, adalah ungkapan pertama yang penulis dapat diucapkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Efek Moderator Aksesibilitas Laporan Keuangan Pada Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan (Study Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pada Kabupaten Maros)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Manajemen PPS STIE Nobel Indonesia.

Salam dan Salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan pengikut setianya hingga akhir zaman.

Berkenan dengan penulisan Tesis ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Saban Echdar, SE, MSi selaku Pembimbing 1 dan Dr. Didiek Handayani Gusti, SE.,M.Si selaku Pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, tuntunan dan dorongan dalam penulisan tesis ini. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk bantuan dan dukungan dari banyak pihak atas selesainya penyusunan maupun penyajian Tesis ini, kepada :

1. Dr. H. Mashur Razak, SE.,MM, Ketua STIE Nobel Indonesia, Hormat yang mendalam dan terima kasih tak terhingga atas segala arahan, disiplin kerja,

bimbingan dan nasehat baik pada saat memberikan materi kuliah maupun pada saat proses penyelesaian studi ini

2. Dr. Maryadi, S.E., M.M , selaku Direktur PPs-STIE Nobel Indonesia yang memberikan kesempatan di dalam menempuh pendidikan di Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar.
3. Prof. Dr. H. Saban Echdar, SE.,M.Si, selaku Asiten Direktur 1 PPs-STIE Nobel Indonesia atas bimbingan, arahan dan disiplin kerja yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikann di PPs STIE Nobel Indonesia Makassar.
4. Dr. Muhammad Idris, S.E., M.Si, selaku Ketua Prodi Magister Manajemen PPs STIE Nobel Indonesia Makassar dengan cermat, penuh perhatian memberikan disiplin kerja untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan studi ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen dan yang telah mengajar dan membina mahasiswa/i selama proses perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
6. Staff yang membantu dalam pelayanan administrasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Suami saya Rahmat, M. Salassa dan anak anak saya Muhammad Aiman Ramadhan, Muhammad Hassan Rahmat, Muhammad Hussein Rahmat yang memberikan doa dan dukungan agar tesis ini dapat terselesaikan.
8. Rahimahullah ayah saya Muhammad Tajuddin, ibu Halia, ayah mertua M. Salassa Kanto, ibu mertua Sinar Tabea dan saudara-saudara saya yang juga memberikan doa dan dukungan agar tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan di dalam Tesis ini.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan tesis ini, sehingga dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Makassar, Desember 2019

Penulis

ABSTRAK

Hasriyani. 2020. Efek Moderator Aksesibilitas Laporan Keuangan Pada Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan (Study Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pada Kabupaten Maros), dibimbing oleh H Saban Echdar dan Didiek Handayani Gusti.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap tranparansi pengelola keuangan dan aksesibilitas sebagai moderator pada penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Penelitian ini menggunakan desain pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi *moderated*. Kemudian ditentukan sampel sebanyak 79 responden PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dari golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 50 orang, golongan II sebanyak 20 orang, golongan I sebanyak 3 orang, dengan pertimbangan bahwa mereka memahami dan bertanggung jawab atas penyajian dan ketersediaan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis uji t, dapat disimpulkan sebagai berikut (1) terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial (X1) terhadap (Y), dimana nilai uji t atau parsial diperoleh sebesar 4.435 dengan nilai signifikansi atau $p < 0,05$ (2) terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial (X2) terhadap (Y), dimana nilai uji t diperoleh sebesar 4.417 dengan nilai signifikan $p < 0,05$ (3) terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial interaksi (X1X2) terhadap (Y), dimana nilai uji t diperoleh sebesar 3.307 dengan nilai signifikansi $p < 0,05$. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F statistik sebesar 5.945 dengan tingkat signifikansi $p < 0,017$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Hasil uji F pada regresi kedua diperoleh nilai F statistic sebesar 4.843 dengan tingkat signifikansi $p < 0,004$. Maka model regresi kedua dapat digunakan untuk memprediksi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Hasil uji koefisien determinasi (Xi), (Xa) dan interaksi (X;X2) terhadap (Y) diperoleh koefisien determinasi (R) sebesar 0.862.

Kata Kunci: *Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Moderator, Transparansi Pengelolaan Keuangan*

ABSTRACT

Hasriyani. 2020. *The Moderator Effect of Accessibility of Financial Statements on the Presentation of Financial Statements toward Financial Management Transparency (Case Study of Regional Financial Management and Revenue in Maros Regency), supervised by H Saban Echdar and Didiek Handayani Gusti.*

This study aims to examine the effect of the presentation of financial statements on the transparency of financial management and accessibility as a moderator in the presentation of financial reports toward the transparency of regional financial management in the Regional Financial Management and Revenue Agency of Maros Regency.

This study used a quantitative approach design with a moderated regression analysis method. Then determined a sample of 79 respondents of PNS (Civil Servant) at Financial Management and Revenue Agency in Maros Regency from group IV as many as 6 people, group III as many as 50 people, group II as many as 20 people, class I as many as 3 people, with the consideration that they understand and were responsible for the presentation and availability of financial statements.

Based on the results of the t-test analysis, it can be concluded that (1) there is a partially significant effect (X1) toward (Y), where the t-test or partial value obtained is 4,435 with a significance value or $p < 0.05$ (2) there is an effect which is partially significant (X2) to (Y), where the t-test value is 4,417 with a significant value of $p < 0.05$ (3) there is a partially significant effect of interaction (X1X2) toward (Y), where the t-test value is obtained amounted to 3,307 with a significance value of $p < 0.05$. Based on the results of the F test, obtained a statistical F value of 5,945 with a significance level of $p < 0.017$, then the regression model can be used to predict Transparency in Financial Management at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Maros Regency. F test results in the second regression obtained a statistical F value of 4,843 with a significance level of $p < 0.004$. Then the second regression model can be used to predict the Transparency of Regional Financial Management at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Maros Regency. The results of the coefficient of determination (Xi), (Xa) and interactions (X; X2) to (Y) obtained the coefficient of determination (R) of 0.862.

Keywords: *Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Statements, Moderators, Financial Management Transparency*

DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN IDENTITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORIGINALITAS DAN PUBLIKASI	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Kajian Teori Dan Pustaka.....	20
2.2.1 Teori Agensi.....	20
2.2.2 Pendekatan Kontinjensi.....	25
2.3 Laporan Keuangan.....	27
2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	27
2.3.2 Komponen Laporan Keuangan.....	29
2.4 Penyajian Laporan Keuangan.....	31
2.5 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Moderator.....	33
2.6 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	34
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	38
3.1 Kerangka Konseptual.....	38
3.2 Hipotesis Penelitian.....	40

3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	41
BAB IV METODE PENELITIAN	45
4.1 Desain dan Jenis Penelitian.....	45
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
4.3 Jenis Data.....	46
4.4 Metode Pengumpulan Data.....	47
4.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
4.6 Pengukuran Variabel.....	48
4.7 Teknik Analisis Data.....	48
4.7.1 Uji Validitas dan Realibilitas Data	48
4.7.2 Model Analisis.....	49
4.7.3 Uji Hipotesis	51
4.7.3.1 Uji Parsial (Uji-t).....	51
4.7.3.2 Uji Simultan (Uji-F)	51
4.7.3.3 Uji R ²	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
5.1. Hasil penelitian.....	54
5.1.1 Deskriptif obyek penelitian	54
5.1.2 Deskriptif responden penelitian.....	61
5.1.3 Deskriptif variabel penelitian	62
5.1.4 Uji Kualitas Data	63
5.1.5 Uji Hipotesis	68
5.2. Pembahasan hasil penelitian.....	77
1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan.	77
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Sebagai Moderator Pada Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan.....	79
3. Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan.....	80
5.2.1. Pembahasan Kualitas Data	82
5.2.2 Pembahasan Penyajian Laporan Keuangan Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	84

5.2.3 Pembahasan Aksesibilitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderator	90
5.2.4 Pembahasan Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara simultan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan.....	95
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
6.1. Kesimpulan.....	98
6.2. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Populasi dan Sampel	46
Tabel 5.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang berakhir sampai Desember 2019	60
Tabel 5.2. Karakteristik Berdasarkan Golongan.....	61
Tabel 5.3. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 5.4. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan.....	62
Tabel 5.5. Penyajian Laporan Keuangan (X₁)	65
Tabel 5.6. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X₂)	65
Tabel 5.7. Transparansi Pengelolaan Keuangan (Y)	66
Tabel 5.8. Uji Realibilitas Data X₁.....	67
Tabel 5.9. Uji Realibilitas Data X₂.....	67
Tabel 5.10. Uji Realibilitas Data Y	68
Tabel 5.11. Hasil Regresi Model Pertama.....	69
Tabel 5.12. Hasil Regresi Model Kedua	71
Tabel 5.13. Nilai (R²).....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian	40
Gambar 5.1. Hubungan Antara Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	69
Gambar 5.2. Hubungan Antara Aksesibilitas Laporan Keuangan Sebagai Moderator Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebebasan politik telah mendorong media massa dengan bebas membeberkan berbagai kasus dan peristiwa yang menyangkut keuangan pemerintah yang sebelumnya hampir tidak tersentuh oleh mata dan telinga publik. Perhatian terhadap isu transparansi pengelolaan keuangan yang berujung pada tingkat akuntabilitas pemerintah semakin meningkat seiring dengan peningkatan sistem teknologi informasi dan keterbukaan publik dekade terakhir ini. . Dengan demikian pemerintah daerah, sebagai daerah otonom memiliki kewenangan Sejak disahkan dan diberlakukannya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah telah mengalami reformasi fundamental, baik secara politis, administratif, teknis maupun keuangan dan ekonomi. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa daerah otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan untuk menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri yang

membawahi pemerintah daerah kemudian melakukan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan diatas mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah sesuai reformasi tata kelola keuangan negara atau daerah. Perubahan yang paling mendasar pada peraturan ini adalah bergesernya fungsi bagian keuangan ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan OPD sebagai *accounting entity* diwajibkan untuk membuat laporan keuangan.

Disamping itu, peraturan tersebut juga mengatur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan dimana pemerintah daerah berkewajiban membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, basis akuntansi di Indonesia mengalami pergeseran yang sebelumnya berbasis kas berubah menjadi berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71/2010 Pasal 1 ayat 3). Dijelaskan lebih jauh SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (PP N0. 71/2010 Pasal 1 ayat 8).

Sistem desentralisasi dan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan menimbulkan konsekuensi dimana pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten/kota, harus dapat meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi pengelolaan keuangan yang mampu menyediakan semua informasi yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik yang juga dapat diakses oleh publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Reformasi pengelolaan keuangan daerah telah lama dilaksanakan. Berbagai persoalan serta proses pembelajaran menuju pengelolaan keuangan daerah yang baik memang belum mencapai kestabilan dengan sempurna.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua dari beberapa asas yang harus dipenuhi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah (Pemda). Pemda melaksanakan transparansi dan akuntabilitas karena kewajiban serta adanya tekanan yang kuat dari pemerintah pusat. Dipertegas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa Kepala Daerah merupakan pengelola keuangan daerah. Ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat (10) yang menyatakan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Dalam mengelola keuangan daerah, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Maros, pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD, kepala OPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Selanjutnya pasal 5 ayat (4) menjelaskan bahwa sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, serta pasal 5 ayat (5) menyatakan bahwa Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada, ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian Nurrizkiana, Handayani, dan Widiastuty (2017), penyajian dan

aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, demikian pula dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik-stakeholder. Laporan keuangan entitas dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dengan entitas lain.

Penelitian diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Romic (2013), menentukan keseluruhan struktur dan isi laporan keuangan tujuan umum dan dengan demikian memastikan bahwa laporan keuangan entitas dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dengan entitas lain. Dengan ini hasil menetapkan Standar Fitur umum Pedoman laporan keuangan terkait dengan strukturnya, dan persyaratan minimum untuk kontennya. IAS1 dimana aplikasi umum dan tidak berurusan dengan transaksi atau kegiatan tertentu yang ditangani dalam rangka standarisasi penyajian laporan keuangan internasional.

Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan, ini bisa dilihat dalam penelitian Nasim dan Syahri Romdhon (2014), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama ada pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi laporan keuangan kepercayaan *muzakki*. Kedua, ada pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan dalam pengelolaan zakat *muzakki*. Ketiga ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan manajer terhadap sikap *muzakki*. Keempat, adanya transparansi pengaruh signifikan pelaporan keuangan, manajemen zakat, dan sikap manajer secara bersamaan pada tingkat kepercayaan *muzakki*. Kepatuhan terhadap undang

undang yang mengatur keuangan tidak akan memastikan transparansi penuh dari prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Menurut Kumeh, Kyereh, Oduro, Brobbey, dan Nketiah (2019), Kepatuhan terhadap undang-undang yang mengatur dana saja tidak akan memastikan transparansi penuh dari operasinya seperti yang dituntut oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Para pemangku kepentingan, menganggap Dewan Dana adalah karena tidak memenuhi kebutuhan informasi mereka. Dalam hal ini dalam keadaan tidak jelas dan tidak transparan, IMF berisiko disalahgunakan dan tidak memenuhi tujuan yang ditetapkan.

Peraturan dapat memfasilitasi penggabungan kewajiban transparansi ke dalam pemerintahan. Selaras dengan hasil penelitian Casadesus de Mingo dan Cerrillo-i-Martinez (2018), legislator biasanya mengabaikan dasar-dasar instrumental dan metodologis dari manajemen arsip. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperbarui undang-undang tentang arsip dan manajemen arsip berkenaan dengan akses ke informasi, transparansi dan akuntabilitas. Boksova, Horak, dan Randakova (2015), menurut penelitiannya bahwa kewajiban setiap entitas akuntansi yang terdaftar dalam daftar Komersial adalah untuk mempublikasikan laporan keuangan dalam kumpulan dokumen setelah disetujui oleh majelis umum. Penelitian ini berkaitan dengan adanya penyajian laporan keuangan.

Dengan adanya penyajian laporan keuangan dapat dilihat tingkat transparansi pengelolaan keuangan. Menurut Sukmadilaga, Pratama, dan Mulyani (2015), meskipun laporan keuangan pemerintah Indonesia memberikan lebih banyak pengungkapan daripada Malaysia, tetapi secara umum, tingkat

pengungkapan di kedua negara lebih lambat, menunjukkan bahwa kedua negara masih harus meningkatkan tingkat pengungkapannya di masa mendatang. Penyajian laporan keuangan, transparansi pengelolaan keuangan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Menurut Nichita dan Vulpoi (2016), variabel-variabel yang digunakan risiko, laporan keuangan, manajemen risiko, pelaporan risiko, catatan atas laporan keuangan. Untuk mengidentifikasi apakah entitas jasa akuntansi mengungkapkan informasi risiko dalam laporan keuangan mereka.

Aksesibilitas laporan keuangan menjadi sangat penting sebagai moderator antara penyajian laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan. Menurut Ismail dan Kuppusamy (2019), daftar hambatan aksesibilitas utama yang diekspos oleh tesis ini dalam hal metrik seperti sejumlah masalah, peringatan dan status pelanggaran kriteria keberhasilan. Sehubungan dengan alat TAW, sejumlah masalah yang diamati adalah 2646, sejumlah besar peringatan untuk skala 15995 dan item yang tidak ditinjau adalah 1356. Dengan alat kapak, total pelanggaran yang diamati adalah tahun 1951 dan item yang perlu ditinjau adalah 1733.

Keberadaan website pemerintah Kabupaten Maros yakni Maroskab.go.id merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Maros. Melalui website tersebut masyarakat dapat mengakses berbagai aktivitas pemerintah serta data-data penting lainnya yang sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (public-stakeholders) yakni: pejabat birokrasi, wakil rakyat/ DPRD, pengusaha, LSM, akademisi, wartawan

dan masyarakat lainnya. Walaupun begitu masih banyak data-data penting dan belum bisa diakses (belum tersedia).

Sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang benar dapat membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Selaras dengan penelitian Rahman (2015), karakteristik good zakat governance di antaranya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang termasuk di dalamnya pengelolaan infak/sedekah. Sebagai pengelola dana umat yang mengandalkan donatur dari umat, transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS) menjadi perhatian utama OPZ. Menurut AA dan S (2016), saat mempersiapkan keuangan pernyataan untuk setiap periode pelaporan, manajemen harus, pada kenyataannya, memiliki ketentuan untuk menganalisis jika ada adalah kondisi atau peristiwa yang hadir yang dapat mencegah entitas untuk melanjutkan bisnis satu tahun dari keuangan tanggal pernyataan. Prinsip pemerintah daerah adalah asumsi laporan keuangan fundamental yang mengasumsikan entitas akan tetap ada dalam pemerintahan untuk masa mendatang.

Tingkat transparansi pengelolaan keuangan harus diterapkan lebih tinggi. Sesuai dengan penelitian Srairi (2019), hasilnya mengungkapkan variasi luas dalam hal pengungkapan di antara bank syariah. Hanya dua negara, Bahrain dan Uni Emirat Arab, yang memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi. Banyaknya informasi berarti tingkat transparansi lebih tinggi dalam pemerintahan daerah. Menurut Oxelheim (2019), pada penyediaan informasi, dengan asumsi tersirat bahwa lebih banyak informasi berarti tingkat transparansi yang lebih

tinggi. lebih banyak informasi juga berarti biaya pemrosesan yang lebih tinggi untuk pengirim dan penerima, sehingga mengetahui pentingnya mengidentifikasi apa yang dilihat sebagai relevansi informasi oleh penerima.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa informasi yang berguna dalam perumusan arah dan kebijakan terkait penyajian laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan pmda serta aksesibilitas sebagai moderator. Dalam hal teoritis, penelitian ini menjadi literatur tambahan dalam pengembangan konsep *good government governance*, khususnya terkait aspek penyajian laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan di lembaga pemerintahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat tesis dengan judul : “Efek Moderator Aksesibilitas Laporan Keuangan Pada Penyajian laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Maros.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros?
2. Bagaimana aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel moderator hubungan penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi keuangan daerah Kabupaten Maros?

3. Apa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel moderator hubungan penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi keuangan daerah kabupaten maros.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten Maros.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis di bidang akuntansi sektor publik dan mengenai penyajian laporan keuangan, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam rangka peningkatan transparansi dalam hal penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan.

3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan untuk melakukan penelitian berikutnya mengenai akuntabilitas maupun transparansi pengelolaan keuangan daerah lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Mulyana dan Budi (2006), dengan penelitian berjudul Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Variabel penelitian meliputi penyajian neraca daerah (X_1), aksesibilitas laporan keuangan daerah (X_2), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah dan atau bersama-sama penyajian laporan neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hanim dan Sustika (2009), judul penelitian Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan variabel penelitian terdiri atas penyajian laporan keuangan daerah (X_1), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Saufi dan Nasution (2010). Penelitian berjudul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan OPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan OPD Terhadap Transparansi

dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan OPD. Variabel penelitian meliputi penyajian laporan keuangan OPD (X_1), aksesibilitas laporan keuangan OPD (X_2), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah dan atau bersama-sama penyajian laporan keuangan OPD dan aksesibilitas laporan keuangan OPD berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD.

Aliyah dan Nahar (2012), judul penelitian yaitu Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemkab Samosir. Variabel penelitian yaitu penyajian laporan keuangan daerah (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah dan atau bersama-sama penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Nurhayani (2013), penelitian berjudul Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemko Bandung. Variabel penelitian terdiri atas penyajian laporan keuangan (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2), akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah dan atau bersama-sama penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Srairi (2019), penelitian dengan judul *Transparency and bank risk-taking in GCC Islamic banking*. Dimana ukuran, efisiensi, tingkat simpanan, pertumbuhan aset, pertumbuhan PDB, kedalaman risiko dan konsentrasi informasi kredit sebagai variable yang digunakan dengan pendekatan model analisis regresi linear berganda dengan perlakuan data GLS technique efek-acak. Hasil yang dikemukakan variasi luas dalam hal pengungkapan di antara bank syariah. Hanya dua negara, Bahrain dan Uni Emirat Arab, yang memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi. Penelitian ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Oxelheim (2019), penelitian dengan judul *Optimal vs satisfactory transparency: The impact of global macroeconomic fluctuations on corporate competitiveness*. Variabel-variabel yang digunakan fluktuasi ekonomi makro, kinerja intrinsik, standar pelaporan keuangan internasional, pengungkapan informasi perusahaan, transparansi optimal, transparansi yang memuaskan, sistem tata kelola perusahaan, pencatatan silang internasional dengan metode analisis data, statistic, model multivarian. Pada penyediaan informasi, dengan asumsi tersirat bahwa lebih banyak informasi berarti tingkat transparansi yang lebih tinggi. lebih banyak informasi juga berarti biaya pemrosesan yang lebih tinggi untuk pengirim dan penerima, sehingga mengetahui pentingnya mengidentifikasi

apa yang dilihat sebagai relevansi informasi oleh penerima .Penelitian ini berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan.

Menurut Kumeh, Kyereh, Oduro, Brobbey, dan Nketiah (2019). Judul penelitian *Transparency in the governance of landscape restoration finance: A case study of Ghana's Forest Plantation Development Fund*. Konservasi lahan hutan, pengembangan perkebunan, pendanaan iklim, akuntabilitas, transparansi, hak atas informasi yang menjadi variabelnya dan Situs studi, Survei dan wawancara informan kunci adalah metode analisis yang dipakai. Kepatuhan terhadap undang-undang yang mengatur dana saja tidak akan memastikan transparansi penuh dari operasinya seperti yang dituntut oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Para pemangku kepentingan, menganggap Dewan Dana adalah karena tidak memenuhi kebutuhan informasi mereka. Dalam hal ini dalam keadaan tidak jelas dan tidak transparan, IMF berisiko disalahgunakan dan tidak memenuhi tujuan yang ditetapkan. Kaitannya dengan penelitian ini adalah kepatuhan terhadap undang undang yang mengatur keuangan tidak akan memastikan transparansi penuh dari prinsip prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Romic (2013) dengan judul *Presentation of Financial Statements*. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel laporan keuangan, laporan penghasilan, arus kas dengan metode analisis penyajian laporan keuangan IAS1. Dengan hasil penelitian menentukan keseluruhan struktur dan isi laporan keuangan tujuan umum dan dengan demikian memastikan bahwa laporan keuangan entitas dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dengan

entitas lain. Dengan ini hasil menetapkan Standar Fitur umum Pedoman laporan keuangan terkait dengan strukturnya, dan persyaratan minimum untuk kontennya. IAS1 dimana aplikasi umum dan tidak berurusan dengan transaksi atau kegiatan tertentu yang ditangani dalam rangka standarisasi penyajian laporan keuangan internasional. Penelitian ini berkaitan dengan adanya standar penyajian laporan keuangan.

Menurut penelitian Nurrizkiana (2017), dengan judul Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. Menggunakan variabel-variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, transparansi, akuntabilitas, kepercayaan publik, pemangku kepentingan, dengan metode penelitian *partial least square analysis*. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, demikian pula dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik-stakeholder. Kaitan dengan penelitian ini untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap transparansi.

Menurut penelitian Abdullah, Almsafir, dan Al-Smadi (2015) *Transparency and Reliability in Financial Statement: Do They Exist? Evidence from Malaysia*. Dengan variabel-variabel etika bisnis, transparansi, akuntansi, akuntabilitas manajemen, keandalan, internal how. Metode yang dipakai dalam penelitian ini

menggunakan mixed method. keterbatasan penelitian berimplikasi pada niat auditor dan manajemen dalam menyembunyikan kebenaran di balik transparansi dan keandalan laporan keuangan. Umumnya, biaya audit dan ukuran audit adalah kebenaran utama yang disembunyikan oleh auditor. Implikasinya adalah nilai transparansi dan keandalan laporan keuangan yang disembunyikan dari investor dan kemampuannya dalam mengembalikannya ke dalam laporan keuangan. Nilai orisinalitas hasilnya melalui pendekatan kuantitatif dan analisis kualitatif tambahan dikumpulkan untuk mendapatkan pengetahuan ekstra dalam transparansi. Kaitan dengan penelitian ini untuk menyelidiki keberadaan keandalan dan transparansi dalam laporan keuangan.

Menurut penelitian Nasim dan Syahri Romdhon (2014) dengan judul Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan *Muzakki*. Menggunakan variabel-variabel transparansi laporan keuangan, manajemen zakat, sikap bisnis, keyakinan dengan metode penelitian analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama ada pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi laporan keuangan kepercayaan *muzakki*. Kedua, ada pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan dalam pengelolaan zakat *muzakki*. Ketiga ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan manajer terhadap sikap *muzakki*. Keempat, adanya transparansi pengaruh signifikan pelaporan keuangan, manajemen zakat, dan sikap manajer secara bersamaan pada tingkat kepercayaan *muzakki*. Kaitannya dengan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan keuangan.

Menurut Nichita dan Vulpoi (2016), dengan judul penelitian *Relationship between risk and transparency in the financial statements of professional services entities*. Variabel-variabel yang digunakan risiko, laporan keuangan, manajemen risiko, pelaporan risiko, catatan atas laporan keuangan dengan metode analisis model regresi. Untuk mengidentifikasi apakah entitas jasa akuntansi mengungkapkan informasi risiko dalam laporan keuangan mereka. Kaitan dengan penelitian ini dimana penyajian laporan keuangan, transparansi pengelolaan keuangan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna.

Menurut Sukmadilaga, Pratama, dan Mulyani (2015). Judul penelitian *Good Governance Implementation InPublic Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries*. ASEAN, Daftar Periksa Pengungkapan, Laporan Keuangan, Tata Kelola yang Baik, Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) adalah variabel-variabel yang digunakan dengan metode analisis kuantitatif eksploratif. Meskipun laporan keuangan pemerintah Indonesia memberikan lebih banyak pengungkapan daripada Malaysia, tetapi secara umum, tingkat pengungkapan di kedua negara lebih lambat, menunjukkan bahwa kedua negara masih harus meningkatkan tingkat pengungkapannya di masa mendatang. Kaitannya dengan penelitian ini, untuk melihat tingkat pengungkapan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah.

Menurut Casadesus de Mingo dan Cerrillo-i-Martinez (2018). Judul penelitian *Improving records management to promote transparency and prevent corruption*. Variabel-variabel yang digunakan transparansi berdasarkan desain,

korupsi, manajemen arsip, spanyol, informasi publik, peraturan dengan metode analisis sistem manajemen arsip dalam administrasi publik. Legislator biasanya mengabaikan dasar-dasar instrumental dan metodologis dari manajemen arsip. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperbarui undang-undang tentang arsip dan manajemen arsip berkenaan dengan akses ke informasi, transparansi dan akuntabilitas. Kaitannya dengan penelitian ini bisa dilihat dengan cara bagaimana peraturan dapat memfasilitasi penggabungan kewajiban transparansi ke dalam pemerintahan.

Menurut penelitian Zehir dan Halil (2016). Dengan judul *Role Of Stakeholder Participation Between Transparency And Qualitative And Quantitive Performance Relations: An Application At Hospital Managements*. Dengan variabel Partisipasi Stakeholder, Transparansi, Kinerja Kualitatif dan Kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan reliabilitas, korelasi dan regresi. Efek mediasi dari partisipasi pemangku kepentingan pada hubungan antara prinsip transparansi dan kinerja kualitatif dan kuantitatif diidentifikasi pertama kali dalam penelitian ini. Karena itu merupakan kontribusi penting bagi literature. Hubungannya dengan penelitian ini adalah transparansi merupakan salah satu prinsip dasar tata kelola laporan keuangan.

Penelitian menurut Boksova, Horak, dan Randakova (2015). Dengan judul *Financial Statements of Companies in the Czech Republic*. Variabel yang digunakan Laporan keuangan, penyajian laporan keuangan dengan metode penelitian secara acak. Kewajiban setiap entitas akuntansi yang terdaftar dalam daftar Komersial adalah untuk mempublikasikan laporan keuangan dalam

kumpulan dokumen setelah disetujui oleh majelis umum. Penelitian ini berkaitan dengan adanya penyajian laporan keuangan.

Menurut Ismail dan Kuppusamy (2019). Judul penelitian *Web accessibility investigation and identification of major issues of higher education websites with statistical measures: A case study of college websites*. Variabel yang digunakan aksesibilitas web, wcag, situs web, perguruan tinggi, alat evaluasi aksesibilitas, uji normalitas, kriteria sukses. Dengan metode tes aksesibilitas web, dan mesin aksesibilitas. Penelitian ini berisi daftar hambatan aksesibilitas utama yang diekspos oleh tesis ini dalam hal metrik seperti sejumlah masalah, peringatan dan status pelanggaran kriteria keberhasilan. Sehubungan dengan alat TAW, sejumlah masalah yang diamati adalah 2646, sejumlah besar peringatan untuk skala 15995 dan item yang tidak ditinjau adalah 1356. Dengan alat kapak, total pelanggaran yang diamati adalah tahun 1951 dan item yang perlu ditinjau adalah 1733. Kaitan dengan penelitian adalah aksesibilitas laporan keuangan menjadi sangat penting sebagai moderator antara penyajian laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan.

2.2 Kajian Teori Dan Pustaka

2.2.1 Teori Agensi

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekkan terutama sejak diberlakukan otonomi daerah sejak tahun 1999. Kemudian berkembang dalam pemikiran Leuf (2006), penerapan teori keagenan ini dapat dijelaskan dari dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislative, dan legislatif dengan rakyat. Dampak dari hubungan tersebut dapat berupa hal positif dan negatif.

Adapun dampak positifnya yaitu dalam bentuk efisiensi, sedangkan dampak negatifnya berupa perilaku *opportunistic*.

Bandariy (2012), dimana hal ini terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan dari pada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini adalah baik, selain itu juga untuk menggunakan posisinya dimata legislative dan rakyat. Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan pengguna laporan keuangan terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini dapat dilihat dari hubungan atau kontrak antara agen dan prinsipal dimana agen memiliki keunggulan karena memiliki lebih banyak informasi ketimbang prinsipal karena prinsipal merupakan pemangku kekuasaan. Adapun salah satu informasi yang dimiliki oleh agen adalah berupa laporan keuangan. Oleh karena itu pemerintah

sebagai pihak agen yang akan memiliki tanggungjawab untuk menyajikan laporan keuangan serta mempublikasikannya untuk memudahkan akses bagi masyarakat sebagai pihak prinsipal memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pemerintahan.

Pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dapat dimulai dari pendekatan *agency theory*. Penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam perspektif *agency theory* dipengaruhi oleh adanya aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator .

Agency theory menjelaskan fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas atau otoritas untuk membuat keputusan Anthony, Robert, dan Govindarajan (2005), seperti dikemukakan di dalam Teng (2018), jika aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros sebagai moderator dalam proses penyajian laporan keuangan, transparansi keuangan pemerintah daerah Pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros membuka akses kepada masyarakat/*stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, akan memungkinkan aksesibilitas laporan keuangan daerah kabupaten Maros memberikan akses laporan keuangan kepada masyarakat untuk membantu kepentingan pemerintah daerah. Namun, sering penyajian laporan keuangan, transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak sama dengan

aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga menimbulkan konflik diantara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini dapat terjadi misalnya, jika dalam melakukan kebijakan pemberian *rewards* pemerintah daerah kepada penyajian laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan didasarkan pada aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan cenderung memberikan informasi yang bias agar aksesibilitas laporan keuangan mudah dicapai dan mendapatkan *rewards* berdasarkan pencapaian tersebut. Kondisi ini jelas akan menyebabkan terjadinya senjangan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan.

Sebaliknya, teoritis akuntansi keperilakuan umumnya berpendapat bahwa partisipasi anggaran akan memotivasi para manajer untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka ke dalam anggaran, pandangan ini pertama kali dikemukakan oleh Schiff dan A.W. Lewin (1970), dan dikembangkan dengan dukungan distribusi menurut Suarez dan Castanon-Puga (2013). Jika aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator memungkinkan dilakukannya dalam penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat menciptakan akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan.

Selain faktor partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, beberapa penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa senjangan anggaran dapat terjadi disebabkan oleh faktor-faktor motivasional. Morrow (1983), menyatakan bahwa pada saat komitmen organisasi dan keterlibatan kerja dihubungkan, menjadikan tipe-tipe kerja lebih jelas, kemudian dikembangkan agensi terdiri dari

keterampilan, perilaku, dan kepercayaan yang mendukung individu untuk bertindak secara independen untuk mengubah praktik di tempat kerja Michael Goller (2017). Manajer yang memiliki tingkat keterlibatan kerja yang tinggi mengidentifikasi pekerjaan mereka dan memelihara pekerjaan mereka Greenhous (2013), manajer dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menciptakan senjangan anggaran, yaitu untuk melindungi pekerjaan mereka dan untuk melindungi image mereka dalam jangka pendek Jackson (2009).

Penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan hasil yang masih saling bertentangan mengenai hubungan antara penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Oleh karena itu perlu menggunakan pendekatan-pendekatan lain dalam melihat hubungan ketiga variabel tersebut. Pendekatan lain tersebut meliputi penggunaan model keagenan (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya) atau dengan menggunakan berbagai faktor kontinjensi dimana aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Maros sebagai moderator.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan hasil yang saling bertentangan mengenai hubungan antara penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros. Sebagian peneliti menyatakan bahwa dengan adanya aksesibilitas laporan keuangan dalam proses penyusunan anggaran akan mengurangi kecenderungan untuk menciptakan senjangan anggaran. Hal ini terjadi karena penyajian laporan keuangan dan

transparansi pengelolaan keuangan serta aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator membantu memberikan informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros, memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu serta membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini sehingga penyajian laporan keuangan yang disusun menjadi lebih akurat.

Aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator justru menyebabkan penyajian laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan cenderung untuk melakukan senjangan laporan keuangan. Oleh karena itu perlu menggunakan pendekatan-pendekatan lain dalam melihat hubungan ketiga variabel tersebut. Pendekatan lain tersebut meliputi penggunaan model keagenan (seperti yang dijelaskan sebelumnya) atau dengan menggunakan berbagai faktor kontinjensi sebagai prediktor adanya senjangan anggaran Teng (2018).

2.2.2 Pendekatan Kontinjensi

Penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan hasil yang saling bertentangan mengenai hubungan antara penyajian laporan keuangan dengan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sebagian peneliti menyatakan bahwa dengan adanya aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator dalam proses penyusunan laporan keuangan akan menggambarkan dengan kejujuran laporan keuangan serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Hal ini terjadi karena aksesibilitas laporan keuangan membantu memberikan kemudahan dalam

memperoleh informasi tentang laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun menjadi lebih akurat.

Peneliti Jackson (2009) mendapatkan bukti empiris bahwa partisipasi anggaran justru menyebabkan manajer yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran cenderung untuk melakukan senjangan anggaran. Oleh karena itu perlu menggunakan pendekatan-pendekatan lain dalam melihat hubungan ketiga variabel tersebut. Pendekatan lain tersebut meliputi penggunaan model keagenan (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya) atau dengan menggunakan berbagai faktor kontinjensi sebagai prediktor adanya senjangan anggaran Teng (2018).

Pengenalan teori kontinjensi pada variabel penyajian laporan keuangan, transparansi pengelolaan keuangan memberikan kontribusi pada pengembangan akuntansi manajemen terutama dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator. Penerapan pendekatan kontinjensi dalam menganalisis dan mendesain sistem pengendalian khususnya dalam bidang sistem manajemen keuangan telah menarik minat para peneliti. Beberapa penelitian dalam bidang manajemen keuangan melalui pendekatan kontinjensi bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel-variabel kontekstual dengan desain sistem akuntansi manajemen dan untuk mengevaluasi keefektifan hubungan antara tiga variabel (misalnya hubungan antara penyajian laporan keuangan, transparansi pengelolaan keuangan serta aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan variabel kontekstual sebagai variabel moderator).

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi beserta yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. Laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).

DPRD selaku wakil rakyat yang disertai untuk melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, wajib memberikan penilaian atas laporan keuangan yang disampaikan kepala daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, tentunya untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, ketaatan terhadap standar akuntansi, penilaian terhadap tingkat ekonomi serta efisiensi penggunaan anggaran (APBD) atau kinerja organisasi. Sementara itu untuk menilai kinerja organisasional, DPRD memerlukan informasi tambahan yang dapat digali dari laporan kinerja kebijakan, program serta kegiatan, dan informasi yang digali langsung dari masyarakat, mengenai tingkat keberhasilan suatu kebijakan, program/kegiatan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Indikator keberhasilan yang akan dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut dapat diketahui dari tingkat kepuasannya. Dengan ini masyarakat merasakan puas terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, sehingga mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut telah mampu memecahkan permasalahannya, begitu pula dengan ketidakpuasan masyarakat atas pelaksanaan suatu kebijakan, menggambarkan tingkat kegagalan dari pelaksanaan suatu kebijakan, atau disebabkan oleh kebijakannya sendiri yang salah.

Atas dasar informasi yang lengkap sebagaimana diuraikan di atas, DPRD memberikan rekomendasi atas perbaikan kinerja manajerial serta kinerja organisasional di masa yang akan datang. Rekomendasi yang disampaikan kepada kepala daerah, sebaiknya dimonitor terus perkembangannya, sehingga temuan-temuan pemeriksaan, dan ketidakefektifan suatu kebijakan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Persetujuan terhadap Peraturan Daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diberikan apabila DPRD telah memperoleh keyakinan dari kepala daerah, bahwa berbagai temuan dari hasil pemeriksaan BPK, serta ketidakefektifan suatu kebijakan tidak akan terulang pada tahun yang akan datang.

Penilaian terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana diketahui bahwa pada awal tahun, pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat rencana kegiatan dan akan dilaksanakan satu tahun serta sumber pembiayaan kegiatan tersebut.

Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran, maka diperlukan analisis terhadap laporan keuangan daerah. Analisis itu dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah posisi keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan ataukah penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab jika menggunakan beberapa metode analisis yang lazim digunakan untuk menganalisis terhadap laporan keuangan.

2.3.2 Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut (Pernyataan No.1 PP No.71/2010 paragraph 14) :

- a) Laporan realisasi anggaran
- b) Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c) Neraca
- d) Laporan operasional
- e) Laporan arus kas
- f) Laporan perubahan ekuitas
- g) Catatan atas laporan keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan dimana entitas pelaporan yang dimaksud adalah masing-masing unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai *accounting entity* yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 paragraph 25 dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, laporan keuangan yang disusun oleh entitas pelaporan digunakan sebagai alat untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas,

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen,

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi,

Memberikan informasi keuangan yang terbuka serta jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka serta menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan antargenerasi,

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) Evaluasi kinerja,

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.4 Penyajian Laporan Keuangan

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat (Permendagri No.13/2006 pasal 4 ayat 1). Definisi keuangan daerah sendiri disebutkan dalam Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 1 ayat 6 yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik menurut *Governmental Accounting Standard Board* (GASB, 2008) adalah :

- a. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik.
- b. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual No.1, paragraph 9, (PP No.71 tahun 2010) disebutkan bahwa : Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, serta perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

2.5 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Moderator

Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pasal 103 dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya melalui publikasi media surat kabar, internet serta media lainnya.

Informasi yang ditampilkan dalam SIKD tersebut dimana dinyatakan secara jelas pada pasal 102, UU No.33 tahun 2004 meliputi :

- a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota
- b. Neraca daerah
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan daerah
- e. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
- f. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah
- g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet), dan forum

yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat Shende dan Bennet (2004).

Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (pasal 1 ayat 2) disebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2.6 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang- Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan UU 17 tahun 2003 disebutkan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU 17 tahun 2003 tersebut transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penyampain laporan keuangan kepada publik merupakan wujud ”transparansi”

dan "akuntabilitas" pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ditetapkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas disusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Definisi transparansi didapatkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diganti melalui PP71 tahun 2010. Dalam kedua peraturan ini ditemukan batasan "transparansi", memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

Definisi ini menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Makna yang terkandung bahwa pemerintah sebagai badan publik harus menyediakan informasi kepada publik.

Dalam Pasal 3 UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Teori keagenan (*Agency Theory*) diyakini sebagai asal usul pentingnya transparansi keuangan. Teori keagenan yang dikenal dalam lingkup manajemen perusahaan menjelaskan adanya hubungan antara agen (manajer atau pengelola perusahaan) dengan prinsipal (pemilik modal, pemilik saham). Dalam hubungan keagenan ini, agen yang diberi tugas mengelola sumber daya perusahaan - termasuk keuangan - sangat mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan mengabaikan kepentingan pemilik (prinsipal). Hal itu dapat terjadi dalam hubungan keagenan karena agen menguasai banyak informasi terkait sumber daya, program dan aktivitas operasi perusahaan. Di sisi lain prinsipal yang diasumsikan jauh dari kegiatan operasional organisasi, tidak terlibat dalam manajemen, dan sangat minim informasi.

Dalam kondisi ini muncul masalah asimetri informasi – kondisi dimana agen memiliki banyak informasi dan dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, sedang prinsipal yang kekurangan informasi sangat mungkin dirugikan dengan keputusan agen. Untuk itu mereka harus

membuat laporan (menyampaikan informasi) kepada pemilik. Informasi yang disampaikan oleh agen kepada prinsipal harus diuji (diverifikasi) kebenarannya. Informasi yang terkait dengan keuangan dalam konsep akuntansi dikerjakan oleh pemeriksa eksternal.

Transparansi publik mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik berkewajiban membuka ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik dengan membuka akses dan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat Santoso dan Pandji (2008).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan Mardiasmo (2002).

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik Mardiasmo (2006).

Definisi transparansi menurut Krina, Loina, dan Lalolo (2003), adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasionalnya.

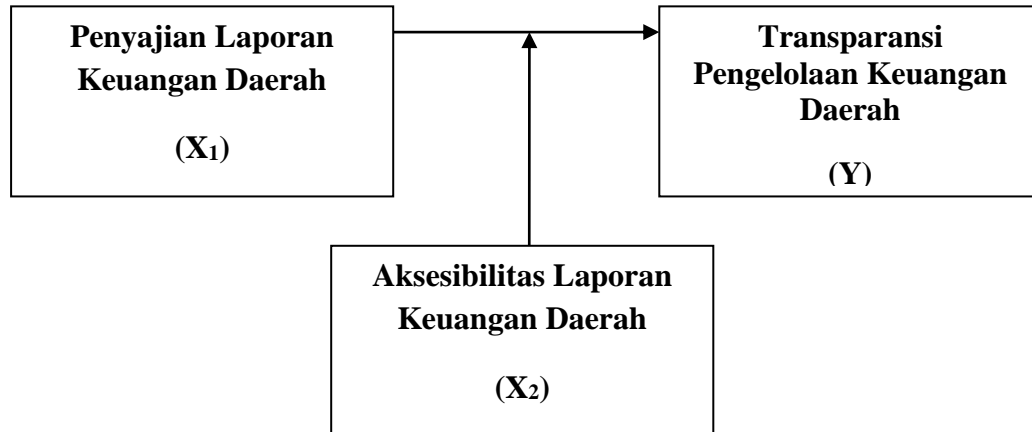
Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan Mulyana (2006). Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan serta penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah kabupaten serta kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola desentralisasi secara transparan, ekonomi, efisien dan akuntabel. Beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan yang memerlukan prioritas utama, agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan konsep *Value For Money* (VFM). Pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan konsep VFM tersebut adalah untuk menjamin dikelolanya uang rakyat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel agar pada akhirnya terwujud akuntabilitas publik Soesastro, Hadi, dan Dkk 2005). Hubungan antara Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah sebagai moderator dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah digambarkan dalam kerangka konseptual berikut :

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian



3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Ada pengaruh signifikan penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Maros.
- H₂ : Ada pengaruh aksesibilitas sebagai moderator penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan.
- H₃ : Ada pengaruh signifikan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Maros.

3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berdasarkan desain penelitian asosiatif kausal yang merupakan desain penelitian yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Variabel independen (X_1) : Penyajian laporan keuangan daerah

Pada penelitian ini penyajian laporan keuangan daerah berperan sebagai variabel independen (X_1). Penyajian laporan keuangan daerah dalam penelitian ini merupakan penyajian laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan entitas pelaporan yang memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah yang berkualitas serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini diadopsi dari Hanim dan Sustika (2009) yang berlandaskan pada PP No.71 tahun 2010 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan bahwa karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang dimuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

Informasi yang relevan adalah :

- Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

- Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan serta kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu

entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna serta dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan serta lingkungan operasi entitas pelaporan, dan adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

b) Variabel Moderator (X_2) : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Moderator

Pada penelitian ini aksesibilitas laporan keuangan daerah berperan sebagai variabel Moderator (X_2). Aksesibilitas laporan keuangan daerah dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Nasution (2010) yang berlandaskan pada Undang-Undang No.33 tahun 2004 pasal 103 dimana dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data yang terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.

c) Variabel dependen (Y) : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada penelitian ini transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini adalah kebebasan untuk mengakses informasi keuangan yang terbuka serta jujur secara menyeluruh dari pemerintah kepada masyarakat untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Hanim dan Sustika (2009). Ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- a. Pengelolaan Keuangan diselenggarakan dengan sistem pengendalian internal yang memadai.
- b. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
- c. Adanya akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.
- e. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Desain dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain pendekatan kuantitatif. Berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel dalam riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, Umar (2003).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan penyajian laporan keuangan daerah sebagai variabel independen terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen dengan aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel moderator. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang ada maka penelitian ini termasuk penelitian *design cross sectional* yaitu penelitian yang melibatkan perhitungan sampel untuk digeneralisir populasinya, melalui inferensial dimana variabel diteliti pada waktu yang bersamaan.

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, dengan waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan.

Menurut Sugiono (2006) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian

ini

menggunakan unit analisis Pegawai Negeri Sipil yang menjadi populasi yang berada di OPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros sebanyak 79 orang.

Tabel 4.1 Tabel Populasi dan Sampel

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	6
2	III	50
3	II	20
4	I	3
TOTAL POPULASI		79

Sumber : Data Sekunder Dari OPD BPKPD

Berdasarkan table 4.1 diatas yang menjadi sampel adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil dan karakteristik berdasarkan golongan yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiono (2006). Oleh karena populasi memiliki karakteristik tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berbeda, maka penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Diharapkan setiap anggota sub populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, sehingga diperoleh sampel sebanyak 79 orang pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maros.

4.3 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil kuosioner yang telah diisi oleh responden, yaitu semua Pegawai Negeri Sipil di OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang menjadi sampel penelitian.

- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu catatan, ataupun laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Selain itu beberapa sumber pustaka dan literatur guna mendapatkan teori – teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4.4 Metode Pengumpulan Data

Jenis data

- a. Data Kualitatif

Dalam penelitian ini, data kualitatif meliputi :

1. Tanggapan responden tentang penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten Maros.
 2. Tanggapan responden tentang aksesibilitas laporan keuangan Kabupaten Maros.
 3. Tanggapan responden tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten Maros.
- b. Data Kuantitatif berasal dari jawaban kuesioner dari responden yang berupa pernyataan.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuesioner , yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada para Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang dijadikan responden.
- b. Interview, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada responden.

4.6 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) poin skala Likert. Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert yaitu dimana responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, objek, atau kejadian Kuncoro dan Mudrajad (2003). Jawaban responden akan diberi skor yaitu :

Skor 1 = Sangat tidak setuju

Skor 2 = Tidak setuju

Skor 3 = Ragu-ragu

Skor 4 = Setuju

Skor 5 = Sangat setuju

4.7 Teknik Analisis Data

4.7.1 Uji Validitas dan Realibilitas Data

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya Ancok (2008). Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner Hakim (2008). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel, maka butir pertanyaan tersebut valid
- 2) Jika r hitung negatif atau r hitung $<$ r tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid
- 3) r hitung dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Correlation*

Nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = $n-k$, dimana : n = Jumlah responden k = merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel

Sedangkan uji reliabilitas menurut Riyadi (2000) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,5 Nunnally (1967). Langkah-langkah melakukan uji reliabilitas terhadap suatu konstruk variabel sama dengan melakukan uji validitas. Output SPSS untuk uji reliabilitas akan dihasilkan secara bersama-sama dengan hasil uji validitas.

4.7.2 Model Analisis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan variabel *moderating*. Menurut Kuncoro dan Mudrajad (2003), sebagai alat statistik, regresi bermanfaat dalam menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut, (1) seberapa jauh variasi perubahan variabel dependen mampu dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model; (2) manakah di antara variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen; (3) apakah dengan dimasukkannya tambahan satu variabel independen dapat memperbaiki prediksi terhadap variabel dependen; (4) apakah prediksi terhadap variabel dependen dari sejumlah variabel independen lebih baik dibandingkan dengan kombinasi variabel independen yang lain; dan (5) apakah penambahan sampel/observasi akan meningkatkan daya prediksi model.

Berbeda dengan penelitian ini apakah variabel dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pendekatan analisis yang dilakukan dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA), metode ini merupakan pengaplikasian khusus regresi linear berganda, dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen).

Metode analisis Regresi digunakan untuk melihat peran variabel moderator yang memperkuat ataupun memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya Echdar (2017). Variabel moderator ini disebut dengan istilah variabel independen kedua. Secara operasional didefinisikan menyerupai variabel kontrol, hanya saja di sini pengaruh variabel itu tidak ditiadakan atau dinetralisir, akan tetapi bahkan dianalisis atau diperhitungkan dalam model.

Model *moderated regression analysis* (MRA). Pengujian regresi dilakukan secara moderasi yaitu dengan melakukan regresi secara bertahap. Regresi pertama, dilakukan tanpa memasukkan variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2).

Model Persamaan regresi tahap pertama:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Model persamaan regresi tahap ke dua :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3 X_1X_2 + e .$$

Keterangan :

Y = Transparansi pengelolaan keuangan daerah (variabel dependen)

X_1 = Penyajian laporan keuangan daerah (variabel independen)

X_2 = Aksesibilitas laporan keuangan daerah (variabel moderating)

a = Konstanta

b_1 = koefisien regresi X_1 (arah garis regresi yang menyatakan perubahan nilai Y, akibat perubahan X_1)

b_2 = koefisien regresi X_2 (arah garis regresi yang menyatakan perubahan nilai Y, akibat perubahan X_2)

e = Kesalahan residual (*error term*)

4.7.3 Uji Hipotesis

4.7.3.1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t dikenal juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah :

H_0 : $b_1 = 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_a : $b_1 \neq 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen

Kriteria pengambilan keputusan :

Apabila probabilitas $<\alpha= 5\%$, maka H_a diterima

Apabila probabilitas $>\alpha= 5\%$, maka H_a ditolak

4.7.3.2 Uji Simultan (Uji-F)

Uji-F digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut :

H_0 : $b_1=b_2=b_3=0$, artinya secara bersama-sama (simultan) variabel independen tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen

H_a : $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, artinya secara bersama-sama (simultan) variabel independen terdapat pengaruh terhadap variabel dependen, dengan kriteria :

H_0 diterima, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_a diterima, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan analisa regresi berganda. Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F atau yang biasa disebut dengan *Analysis of Variance (ANOVA)*. Pengujian ANOVA atau Uji F bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat tingkat signifikansi atau dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA $< \alpha 0,05$, maka H_0 ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel ANOVA $> \alpha 0,05$, maka H_0 diterima (tidak berpengaruh). Pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($\alpha 0,05$) maka H_0 ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($\alpha 0,05$) maka H_0 diterima (tidak berpengaruh). Adapun F_{tabel} dicari dengan memperhatikan tingkat kepercayaan (α) dan derajat bebas (*degree of freedom*).

4.7.3.3 Uji R^2

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel terikat. atau untuk

Uji ketetapan perkiraan (R^2) dilakukan untuk mendeteksi ketetapan yang paling baik dalam analisis regresi. Uji R^2 berkisar antara nol sampai dengan 1 ($0 \leq \text{uji } R^2 \leq 1$). Hal ini berarti apabila Uji $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila Uji R^2 semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila Uji R^2 semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil penelitian

5.1.1 Deskriptif obyek penelitian

Lokasi penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan responden penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil di instansi tersebut. Daerah adalah Kabupaten Maros, pemerintah daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Susunan organisasi badan terdiri dari :

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan dan menentukan kebijakan

penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan asset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Badan mempunyai fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahandan pelayanan umum bidang keuangan dan asset daerah, merumuskan program kerja di bidang keuangan dan asset daerah berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh secretariat, bidang, subbag dan sub bidang, pelaksanaan administrasi badan pengelolaan keuangan dan asset daerah dan penyelenggaraan fungsi kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

b. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengordinasikan kegiatan , memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum, asset dan kepegawaian dalam lingkungan Badan. Sekretaris mempunyai fungsi pengoordinasian pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan, pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelola Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman pengelola keuangan. Kepala Bidang anggaran mempunyai fungsi perumusan prosedur penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), pelaksanaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa, hibah dan bantuan keuangan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Penatausahaan Keuangan

Bidang penatausahaan keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman penatausahaan keuangan. Kepala Bidang Penatausahaan keuangan mempunyai fungsi perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah, penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan, pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pelaksanaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah, perumusan kebijakan teknis dibidang penerimaan dan pengeluaran kas, pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah, penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan

administrasi keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengelolaan kas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Asset

Bidang Asset dipimpin oleh Kepala Badan Asset mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan, menyusun, mengordinasikan, menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan. Kepala Bidang Asset mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja bidang asset, perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pengamanan asset, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan asset, pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamatan asset, pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian asset, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang asset.

f. Bidang pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan

Bidang Pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan dipimpin oleh Kepala Bidang pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman penatausahaan keuangan. Kepala Bidang pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan mempunyai fungsi pengelolaan data subjek dan objek pajak dan retribusi (kecuali PBB dan BPHTB), menyusun daftar induk wajib pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB), perhitungan dan penetapan pajak daerah, pelaksanaan dan pendistribusian serta

penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, pelaksanaan penagihan pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) serta memberikan pelayanan keberatan sesuai ketentuan, penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala, pelaksanaan perhitungan, penagihan, pencatatan dan penatausahaan dana perimbangan, perencanaan pengawasan dan melaksanakan evaluasi terkait proses pendaftaran perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) dan retribusi daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman PBB dan BPHTB. Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja dan program kegiatan bidang PBB dan BPHTB, pelaksanaan program kegiatan dan analisis rumusan kebijakan Bidang PBB dan BPHTB, pelaksanaan dan pengordinasian dengan instansi/pihak yang terkait mengenai penetapan, perhitungan, pengelolaan serta pengawasan dan evaluasi bidang PBB dan BPHTB dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

h. LKPP

Melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Fungsi LKPP adalah penyusunan strategi prosedur dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha, penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan system informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum, pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP dan pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

i. Bendahara

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi dibidang laporan pertanggungjawaban/menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang dalam rangka pelaksanaan APBD.

Tugas bendahara yaitu membuat dan mengajukan SPP berdasarkan operasional kegiatan untuk mendapatkan UP/PPKD, mengumpulkan data dari setiap Bidang sebagai bahan untuk pengajuan SPP, membuat dan mengajukan SPP Belanja GU/TU/BTL berdasarkan operasional kegiatan, membuat dan mengajukan SPP Belanja LS berdasarkan operasional kegiatan, menyusun SPJ

pengeluaran belanja, melakukan kewajiban perpajakan ke kas negara atas pertanggungjawaban belanja, membukukukan semua SPJ pengeluaran anggaran belanja untuk tertib administrasi, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada atasan untuk memberikan gambaran akhir dari pelaksanaan tugas, menerima dan menyimpan uang pendapatan daerah, menyetorkan uang pendapatan daerah ke rekening kas daerah secara periodic sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menatausahakan transaksi uang pendapatan daerah, menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai uraian tugas agar tugas berjalan lancar, menerima dan menyimpan uang pendapatan daerah pada PPKD, menyetorkan uang pendapatan daerah pada PPKD ke rekening kas daerah secara periodic sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan daerah pada PPKD, menatausahakan transaksi penerimaan pendapatan keuangan daerah pada PPKD, menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara pada PPKD.

Tabel 5.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang berakhir sampai Desember 2019

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%
1	Pendapatan – LRA	1.497.906.779.871,00	1.328.562.204.286,56	88,69
2	Belanja	1.369.898.531.098,61	935.639.448.888,98	68,30
3	Transfer	181.551.242.500,00	133.411.178.606,00	73,48
4	Pembiayaan	85.667.543.793,61	70.605.268.760,61	82,42
	Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)		328.116.845.552,19	

Sumber : Data Sekunder Dari OPD BPKPD

5.1.2 Deskriptif responden penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 79 rangkap kuesioner dan kembali sebanyak 79 rangkap kuesioner. Ini berarti kuesioner terisi semua oleh responden. Gambaran yang diperoleh tentang karakteristik responden akan dilakukan dengan pengolahan data melalui perhitungan statistik deskriptif. Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh dari jawaban responden atas pernyataan yang diajukan oleh peneliti.

Tabel 5.2. Karakteristik Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	6
2	III	50
3	II	20
4	I	3
TOTAL		79

Sumber : Data Sekunder Dari OPD BPKPD

Berdasarkan tabel 5.2 diatas yang menjadi sampel adalah jumlah pegawai Negeri Sipil dan karakteristik berdasarkan golongan. Menunjukkan bahwa jumlah responden yang bergolongan III yang paling banyak yaitu berjumlah 50 orang.

Tabel 5.3. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Laki-laki	48
2	Perempuan	31
TOTAL		79

Sumber : Data Sekunder Dari OPD BPKPD

Berdasarkan tabel 5.3 diatas yang menjadi sampel adalah jumlah pegawai Negeri Sipil dan karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 48 orang.

Tabel 5.4. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	SMP	3
2	SMA	20
3	S1	41
4	S2	15
TOTAL		79

Sumber : Data Sekunder Dari OPD BPKPD

Berdasarkan tabel 5.4 diatas yang menjadi sampel adalah jumlah pegawai Negeri Sipil dan karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan. Menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah responden yang tingkat pendidikan starata satu (S1) yaitu sebanyak 41 orang.

5.1.3 Deskriptif variabel penelitian

a. Penyajian laporan keuangan daerah (X_1)

Pada penelitian ini penyajian laporan keuangan daerah berperan sebagai variabel independen (X_1). Penyajian laporan keuangan daerah dalam penelitian ini merupakan penyajian laporan terstruktur mengenai posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan entitas pelaporan yang memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini diadopsi dari Hanim dan Sustika (2009) yang berlandaskan pada PP No.71 tahun 2010 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan bahwa karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

b. Aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator (X_2)

Aksesibilitas laporan keuangan daerah dalam penelitian ini yaitu kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Nasution (2010) yang berlandaskan pada Undang-Undang No.33 tahun 2004 pasal 103 dimana dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data yang terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.

c. Transparansi pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Hanim dan Sustika (2009). Ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah, yaitu Pengelolaan keuangan diselenggarakan dengan sistem pengendalian internal yang memadai, penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal, adanya akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah, dan mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani.

5.1.4 Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini jumlah kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 79 kuesioner. Kemudian Kuesioner digunakan/diolah uji kualitas data sebanyak 79 kuesioner. Karakteristik berdasarkan golongan, jenis kelamin dan

tingkat pendidikan. Data-data yang diperoleh melalui kuesioner berupa tanggapan-tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan positif yang berhubungan dengan indikator masing-masing variabel diukur dengan skala likert.

5.1.4.1 Uji Validitas Data

Untuk menjaga kualitas data dilakukan uji validitas data yang berjumlah 79 responden. Uji validitas data merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, ditunjukkan dengan hasil r hitung seluruh pertanyaan itu lebih besar dari 0,03. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam instrument dalam penelitian ini valid. Karena memenuhi syarat pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program SPSS Versi 20, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel, maka butir pertanyaan tersebut valid
- 2) Jika r hitung negatif atau r hitung $<$ r tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid
- 3) r hitung dapat dilihat pada kolom Corrected Item Total Corelation

Nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = $n-k$, dimana : n = Jumlah responden k = merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya. Dimana faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner.

Tabel 5.5. Penyajian Laporan Keuangan (X₁)

No	r hit	Sig	r tabel	Ket
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (X₁)				
1	0.152	0.183	0.30	Tidak Valid
2	0.322	0.004	0.30	Valid
3	0.500	0.000	0.30	Valid
4	0.616	0.000	0.30	Valid
5	0.535	0.000	0.30	Valid
6	0.336	0.000	0.30	Valid
7	0.502	0.000	0.30	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari tabel 5.5 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang pernyataan dari variabel penyajian laporan keuangan (X₁) adanya 6 pernyataan yang ditunjukkan dengan hasil r hitung seluruh pertanyaan itu lebih besar dari 0,03. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam instrument dalam penelitian ini valid. Kecuali pernyataan no. 1, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros memungkinkan pengguna mengoreksi eksepektasi mereka dimasa lalu dikatakan tidak valid dikarenakan hasil r hitung lebih kecil dari 0,03. Sehingga disimpulkan untuk mendrop pernyataan tidak valid.

Tabel 5.6. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X₂)

No	r hit	Sig	r tabel	Ket
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI MODERATOR (X₂)				
1	0.558	0.000	0.30	Valid
2	0.573	0.000	0.30	Valid
3	0.458	0.000	0.30	Valid
4	0.516	0.000	0.30	Valid
5	0.617	0.000	0.30	Valid
6	0.524	0.000	0.30	Valid
7	0.423	0.000	0.30	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari tabel 5.6 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang pernyataan dari variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) sebagai moderator. Adanya 7 pernyataan yang ditunjukkan dengan hasil r hitung seluruh pertanyaan itu lebih besar dari 0,03. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam instrument dalam penelitian ini valid.

Tabel 5.7. Transparansi Pengelolaan Keuangan (Y)

No	r hit	Sig	r tabel	Ket
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN (Y)				
1	0.423	0.000	0.30	Valid
2	0.361	0.001	0.30	Valid
3	0.429	0.000	0.30	Valid
4	0.417	0.000	0.30	Valid
5	0.445	0.000	0.30	Valid
6	0.468	0.000	0.30	Valid
7	0.423	0.000	0.30	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari tabel 5.7 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang pernyataan dari variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y). Dengan adanya 7 pernyataan yang ditunjukkan dengan hasil r hitung seluruh pertanyaan itu lebih besar dari 0,03. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam instrument dalam penelitian ini valid.

5.1.4.2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat analisis SPSS versi 20. Setelah penulis mengambil data yang berjumlah 79 responden dengan uji

reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,8. Hasil uji realibilitas data dalam penelitian ini nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,8. Dalam penelitian ini hasil output SPSS versi 20 untuk uji reliabilitas dihasilkan secara bersama-sama dengan hasil uji validitas data.

Tabel 5.8. Uji Realibilitas Data X₁

Cronbach's Alpha	N of Items
.632	8

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari tabel 5.8 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang pernyataan dari variabel penyajian laporan keuangan (X₁). Adanya 7 pernyataan yang ditunjukkan dengan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam instrument dalam penelitian ini reliable.

Tabel 5.9. Uji Realibilitas Data X₂

Cronbach's Alpha	N of Items
.712	8

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari tabel 5.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang pernyataan dari variabel aksesibilitas laporan keuangan (X₂) sebagai moderator. Adanya 7 pernyataan yang ditunjukkan dengan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam instrument dalam penelitian ini reliabel.

Tabel 5.10. Uji Realibilitas Data Y

Cronbach's Alpha	N of Items
.627	8

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari tabel 5.10 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang pernyataan dari variabel transparansi pengelolaan keuangan (Y). Adanya 7 pernyataan yang ditunjukkan dengan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam instrument dalam penelitian ini reliabel.

5.1.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan variabel *moderating*. Dengan bantuan alat analisis SPSS versi 20 sebagai alat statistik, regresi bermanfaat dalam menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut, (1) seberapa jauh variasi perubahan variabel dependen mampu dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model; (2) manakah di antara variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen; (3) apakah dengan dimasukkannya tambahan satu variabel independen dapat memperbaiki prediksi terhadap variabel dependen; (4) apakah prediksi terhadap variabel dependen dari sejumlah variabel independen lebih baik dibandingkan dengan kombinasi variabel independen yang lain; dan (5) apakah penambahan sampel/observasi akan meningkatkan daya prediksi model.

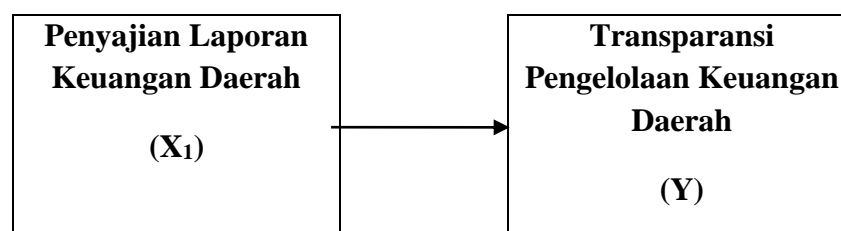
Berbeda dengan penelitian ini apakah variabel dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta variabel moderator. Pendekatan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan

menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Metode analisis moderasi digunakan untuk melihat peran variabel moderator yang memperkuat ataupun memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Variabel moderator ini disebut dengan istilah variabel independen kedua, hanya saja di sini pengaruh variabel itu tidak ditiadakan atau dinetralisir, akan tetapi bahkan dianalisis atau diperhitungkan.

Model analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*). Pengujian regresi dilakukan secara *moderated* yaitu dengan melakukan regresi secara bertahap. Regresi pertama, dilakukan tanpa memasukkan variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2).

Persamaan regresi tahap pertama adalah $Y = a + b X_1$.

Gambar 5.1. Hubungan Antara Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah



Berdasarkan pengujian diperoleh hasil-hasil sebagai berikut :

Tabel 5.11. Hasil Regresi Model Pertama

Variabel	Parameter	T	P
a. Konstanta	24.159	6.986	0.000
b. Penyajian Laporan Keuangan	0.262	2.438	0.017
$R^2 : 0,717$ $F : 5.945$ $Sig : 0.017^b$			

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil-hasil perolehan uji regresi pada tabel diatas, maka persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 24.159 + 0.262X_1$$

Dari persamaan tersebut diatas selanjutnya dapat diartikan bahwa apabila nilai-nilai X dianggap konstan maka transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros adalah sebesar 24.159. Parameter untuk penyajian laporan keuangan adalah sebesar 0.262, hal ini dapat diartikan bahwa setiap ada peningkatan penyajian laporan keuangan sebesar satu satuan akan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan sebesar 0.262 satuan. Tanda positif (+) pada variabel penyajian laporan keuangan menunjukkan arah searah, artinya apabila penyajian laporan keuangan meningkat maka transparansi pengelolaan keuangan akan meningkat pula.

Regresi kedua dilakukan dengan memasukkan variabel moderator aksesibilitas laporan keuangan (X_2) dan interaksi antara penyajian laporan keuangan dengan aksesibilitas laporan keuangan .

Persamaan regresi kedua adalah $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2$.

apabila penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan meningkat maka transparansi pengelolaan keuangan akan meningkat pula. Akan tetapi pada parameter interaksi diperoleh tanda negatif, hal ini berarti interaksi antara penyajian laporan keuangan dengan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap transparansi pengelolaan keuangan.

Hasil perhitungan parameter penyajian laporan keuangan adalah sebesar 2.769, hal ini dapat diartikan bahwa setiap ada peningkatan penyajian laporan keuangan sebesar satu satuan, maka transparansi pengelolaan keuangan akan dapat meningkat sebesar 2.769 satuan. Hasil perhitungan parameter aksesibilitas laporan keuangan diperoleh sebesar 2.728 artinya setiap ada peningkatan aksesibilitas laporan keuangan sebesar satu satuan akan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan sebesar 2.728 satuan. Hasil perhitungan parameter interaksi antara X_1X_2 sebesar -0.068 artinya setiap ada peningkatan interaksi antara penyajian laporan keuangan dengan aksesibilitas laporan keuangan sebesar satu satuan akan menurunkan transparansi pengelolaan keuangan sebesar -0.068 satuan.

1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t dikenal juga sebagai uji signifikansi individual.

Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah :

H_0 : $b_1 = 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_a : $b_1 \neq 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen

Kriteria pengambilan keputusan :

Apabila probabilitas $\rho > 0,05$, maka H_0 diterima

Apabila probabilitas $\rho < 0,05$, maka H_0 ditolak

Berdasarkan hasil analisis uji t yang disajikan dalam Tabel 5.12, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Ada pengaruh yang signifikan secara parsial Penyajian Laporan Keuangan (X_1) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan (Y) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan uji t dimana nilai uji t atau parsial diperoleh sebesar 4.435 dengan nilai signifikansi atau $\rho < 0,05$.
- Ada pengaruh yang signifikan secara parsial Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) terhadap Transparansi Pengelola Keuangan Daerah (Y) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan uji t atau parsial dimana nilai uji t diperoleh sebesar 4.417 dengan nilai signifikan $\rho < 0,05$.
- Ada pengaruh yang signifikan secara parsial interaksi Penyajian Laporan Keuangan dengan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_1X_2) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan uji t dimana nilai uji t diperoleh sebesar 3.307 dengan nilai signifikansi $\rho < 0,05$.

2. Uji Simultan (Uji F Statistik)

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas yang akan dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

Ho: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara bersama sama terhadap variabel terikat.

Ha: $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: Ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah Ho diterima apabila nilai signifikansi $\rho < 0,05$ dan Ha ditolak apabila nilai signifikansi $\rho > 0,05$.

Berdasarkan hasil uji F, yang ditunjukkan dalam diperoleh nilai F statistik sebesar 5.945 dengan tingkat signifikansi ρ 0.017. Mengingat nilai probabilitas $0.017 < 0.05$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Hasil uji F pada regresi kedua diperoleh nilai F statistic sebesar 4.843 dengan tingkat signifikansi ρ 0.004. Mengingat probabilitas $0.004 < 0,05$, maka model regresi kedua dapat digunakan untuk memprediksi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros serta interaksi antara Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara bersama sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Transparansi Pengelolah Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

3. Uji R^2

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada regresi sebelum interaksi diperoleh nilai (R^2) : 0,717. Hal ini berarti bahwa 71,7 % variabilitas Transparansi Pengelolaan Keuangan ditentukan oleh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Maros, sisanya sebesar 28,3% ditentukan oleh variabel lain.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) Penyajian Laporan Keuangan (X_1), Aksesibilitas Laporan Keuangan dan interaksi antara Penyajian Lapoan Keuangan dengan Aksesibilitas Laporan Keuangan(X_1X_2) terhadap Transparansi Pengelolah

Keuangan Daerah Kabupaten Maros(Y) yang ditunjukkan dalam Tabel 5.12 diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.862. Hal ini berarti 86,2% variabilitas Transparansi Pengelolah Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dapat dijelaskan oleh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan interaksi antara Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan. Sisanya sebesar 13,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model dalam penelitian ini. Variabel-variabel lain yang diluar model ini seperti gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, kinerja pegawai, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan lain-lain.

Berdasarkan kedua nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari regresi sebelum dan sesudah interaksi dapat diketahui bahwa besarnya perubahan nilai (R^2) adalah sebesar 0,145 atau mengalami kenaikan. Agar lebih jelas, perubahan nilai (R^2) sebelum dan sesudah interaksi dapat disajikan kedalam tabel berikut ini,

Tabel 5.13. Nilai (R²)

Nilai R Statistik Sebelum Interaksi	Nilai R Statistik Setelah Interaksi	Perubahan Nilai R (ΔR)
0,717	0.862	0,145

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

5.2. Pembahasan hasil penelitian

Pembahasan tentang hasil bahasan terhadap hasil analisis data terhadap permasalahan. Untuk itu secara sistematis akan dibahas setiap permasalahan dalam penelitian dengan mengacu pada hasil temuan penelitian dilapangan.

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan.

Hipotesis yang ada pada hasil penelitian ini dimana terdapat pengaruh yang signifikan Penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelola keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros terhadap Transparansi Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan uji statistik t pada regresi pertama maupun regresi kedua. Hal ini uji t statistik pada regresi pertama dengan melibatkan variabel Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros sebagai variabel bebas diperoleh nilai t sebesar 2.438 dengan nilai signifikansi $\rho < 0,05$.

Hasil uji t statistik pada regresi kedua dengan melibatkan variabel Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, Aksesibilitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan interaksi Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dengan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros sebagai variabel bebas diperoleh nilai uji t dengan nilai signifikan $\rho < 0,05$. Hal tersebut membuktikan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros berpengaruh terhadap Transparansi Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Hasil temuan penelitian ini adalah bahwa dengan adanya pengaruh yang signifikan dari Penyajian Laporan Keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, maka diharapkan transparansi laporan keuangan ada ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai. Hal ini sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menginformasikan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Sebagai Moderator Pada Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini, aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator berpengaruh terhadap interaksi penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Hipotesis yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah tidak terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji regresi moderated dimana terjadi perubahan nilai uji F statistik pada regresi kedua yang melibatkan aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel moderator.

Pada hasil uji regresi pertama, yang hanya melibatkan variabel penyajian laporan keuangan sebagai variabel bebas diperoleh nilai uji F statistik sebesar 5.945 dengan $\rho < 0,05$. Hasil uji regresi tingkat dua dengan memasukkan variabel aksesibilitas laporan keuangan dan interaksi antara penyajian laporan keuangan dengan aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 4.843 dengan nilai signifikan $\rho < 0,05$. Parameter untuk konstanta pada regresi pertama menunjukkan besaran 24.159, sedangkan parameter konstanta pada regresi kedua menunjukkan besaran -64.265. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan memperlemah pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maros.

Hasil temuan penelitian dilapangan menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan memperlemah pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Berdasarkan jawaban responden tentang persepsi mereka mengenai aksesibilitas laporan keuangan yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros, menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pemerintah daerah menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan yang bersifat moderator. Hal ini dianggap kurang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang sedang berjalan saat ini.

Serta aksesibilitas laporan keuangan dianggap memperlemah pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, dikarenakan minimnya edukasi infrastruktur untuk mengakses informasi aksesibilitas laporan keuangan. Penelitian ini berdasarkan jawaban responden tentang persepsi mereka mengenai aksesibilitas laporan keuangan yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

3. Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ada pengaruh signifikan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Maros.

Hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan terhadap

transparansi pengelolaan keuangan daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros terbukti.

Hal ini berdasarkan hasil uji F, yang ditunjukkan dalam diperoleh nilai F statistik sebesar 5.945 dengan tingkat signifikansi ρ 0.017. Mengingat nilai probabilitas $0.017 < 0.05$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Hasil uji F pada regresi kedua diperoleh nilai F statistic sebesar 4.843 dengan tingkat signifikansi ρ 0.004. Mengingat probabilitas $0.004 < 0,05$, maka model regresi kedua dapat digunakan untuk memprediksi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros serta interaksi antara Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara bersama sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Transparansi

Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

5.2.1. Pembahasan Kualitas Data

Uji validitas data yang berjumlah 79 responden dengan uji validitas data merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, ditunjukkan dengan hasil r hitung seluruh pertanyaan itu lebih besar dari 0,03. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam instrument dalam penelitian ini valid. Karena memenuhi syarat pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program SPSS Versi 20.

5.2.1.1 Pembahasan Validitas Data Penelitian

Uji validitas data yang berjumlah 79 responden merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, ditunjukkan dengan hasil r hitung seluruh pertanyaan itu lebih besar dari 0,03. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam instrument dalam penelitian ini valid. Karena memenuhi syarat pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program SPSS Versi 20.

Dari tabel 5.3 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang pernyataan dari variabel penyajian laporan keuangan (X_1) berpengaruh secara signifikan itu bisa dilihat dengan adanya 6 pernyataan yang ditunjukkan dengan hasil r hitung seluruh pertanyaan itu lebih besar dari 0,03. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam instrument dalam penelitian ini valid. Karena memenuhi syarat pengujian validitas dilakukan dengan

menggunakan alat bantu program SPSS Versi 20. Kecuali pernyataan no. 1, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros memungkinkan pengguna mengoreksi eksepektasi mereka dimasa lalu dikatakan tidak valid dikarenakan hasil r hitung lebih kecil dari 0,03.

Dari tabel 5.4 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang pernyataan dari variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) sebagai moderator berpengaruh secara signifikan dan positif itu bisa dilihat dengan adanya 7 pernyataan yang ditunjukkan dengan hasil r hitung seluruh pertanyaan itu lebih besar dari 0,03. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam instrument dalam penelitian ini valid. Karena memenuhi syarat pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program SPSS Versi 20.

Dari tabel 5.5 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang pernyataan dari variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y) berpengaruh secara signifikan dan positif itu bisa dilihat dengan adanya 7 pernyataan yang ditunjukkan dengan hasil r hitung seluruh pertanyaan itu lebih besar dari 0,03. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam instrument dalam penelitian ini valid. Karena memenuhi syarat pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program SPSS Versi 20.

Uji validitas data yang berjumlah 79 responden yang dikatakan berpengaruh secara positif dan signifikan dikarenakan pernyataan dalam instrument dalam penelitian ini valid, walaupun ada pernyataan no. 1, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros memungkinkan pengguna

mengoreksi eksepektasi mereka dimasa lalu dikatakan tidak valid dikarenakan hasil r hitung lebih kecil dari 0,03. Sehingga disimpulkan untuk mendrop pernyataan tidak valid.

5.2.1.2 Pembahasan Realibilitas Data Hasil Penelitian

Dari tabel 5.6, tabel 5.7 dan tabel 5.8 dapat dijelaskan bahwa uji reliabilitas data yang berjumlah 79 responden dengan uji reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,8. Hasil uji realibilitas data dalam penelitian ini nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,8. Dalam penelitian ini hasil output SPSS versi 20 untuk uji reliabilitas dihasilkan secara bersama-sama dengan hasil uji validitas data.

Dari hasil uji realibilitas dengan data yang berjumlah 79 dapat dikatakan reliabel ini dikarenakan Hasil uji realibilitas data dalam penelitian ini nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,8. Dalam penelitian ini hasil output SPSS versi 20 untuk uji reliabilitas dihasilkan secara bersama-sama dengan hasil uji validitas data.

5.2.2 Pembahasan Penyajian Laporan Keuangan Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menentukan keseluruhan struktur dan isi laporan keuangan dan tujuan umum dengan memastikan bahwa laporan keuangan entitas dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dengan entitas lain. Dengan ini hasil menetapkan harus ada standar fitur umum pedoman laporan keuangan

yang terkait dengan strukturnya, dan persyaratan minimum untuk masing-masing kontennya. dimana aplikasi umum tidak berurusan dengan transaksi atau kegiatan tertentu yang ditangani dalam rangka standarisasi penyajian laporan keuangan daerah. Dengan adanya standar penyajian laporan keuangan daerah laporan keuangan pemda Maros memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi kejadian masa lalu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, demikian pula dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik-stakeholder. Untuk menguji pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi. Sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemda Maros dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan masyarakat. Penelitian ini selaras dengan penelitian Ismail dan Kuppusamy (2019), Boksova, Horak, dan Randakova (2015), dan Seyam dan Brickman (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah dan atau bersama-sama penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Umumnya, biaya audit dan ukuran audit adalah kebenaran utama yang disembunyikan oleh auditor. Implikasinya adalah nilai transparansi dan keandalan laporan keuangan yang disembunyikan dari masyarakat dan kemampuannya dalam mengembalikannya ke dalam laporan keuangan. Nilai orisinalitas hasilnya

melalui pendekatan kuantitatif dan analisis kualitatif tambahan dikumpulkan untuk mendapatkan pengetahuan ekstra dalam transparansi. Penelitian ini untuk menyelidiki keberadaan keandalan dan transparansi dalam laporan keuangan, untuk kepentingan masyarakat. Keterbukaan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik dalam hal laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.

Pihak pemerintah daerah Kabupaten Maros harus senantiasa memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Ini dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan daerah karena itu merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang diberikan pemerintah ke masyarakat sehingga masyarakat bisa menggunakan informasi keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan dalam segala bidang. Hal ini sejalan dengan teori keagenan. Dalam hal ini keterkaitan antara keseimbangan informasi dapat dilihat pada pihak penyaji dan pihak pengguna dimana kedua pihak ini harus memiliki keseimbangan informasi. Pihak penyaji harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada pihak pengguna tanpa ada yang ditutupi.

Penyajian laporan keuangan daerah dalam penelitian ini merupakan penyajian laporan terstruktur mengenai posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan entitas pelaporan yang memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah yang berkualitas serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan berbasis Akrua, deskripsi data mencakup transparansi pengelolaan keuangan dan ketersediaan informasi laporan keuangan daerah untuk pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan data yang diperoleh memungkinkan

untuk mengidentifikasi tingkat ketersediaan informasi laporan keuangan pemerintah daerah untuk berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Ini adalah bagian dari penegakan hak sipil di bidang kontrol informasi dan pemeriksaan validitas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

Dalam tata kelola pemerintahan daerah, transparansi pengelolaan keuangan dikaitkan dengan penyajian laporan keuangan, peningkatan akuntabilitas, serta kemampuan, kepatuhan, keberlanjutan, dan hasil yang lebih adil. Penyajian laporan keuangan daerah yang baik yang dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Akses ke informasi, pelaporan, jaminan kualitas, informasi/akreditasi kepatuhan, partisipasi masyarakat, dan kemampuan untuk meninjau/mengajukan keputusan, merupakan praktek penyajian laporan keuangan yang baik yang dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros menggambarkan dengan kejujuran transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Dalam pemerintahan daerah penyajian pelaporan keuangan wajib, peneliti menganggap penyajian laporan keuangan sebagai tahap dalam proses

pengambilan keputusan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan pengungkapan laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangan daerah. Penerapan atau kepatuhan penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan menunjukkan hubungan yang signifikan dalam hal pengungkapan laporan keuangan. Manajemen keuangan pemerintah daerah merupakan penentu penting dari penerapan dan kuantitas penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.

Dengan asumsi yang mendasari bahwa transparansi pengelolaan keuangan adalah bentuk peningkatan pengungkapan informasi tidak dapat dihindari mengarah pada peningkatan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros. Penelitian ini diambil dari literatur transparansi serta dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual untuk pelaporan keuangan. Penyajian laporan keuangan memungkinkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah di mana dan kapan transparansi bekerja, dan di mana dan kapan hal itu dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana peningkatan pengungkapan informasi dan pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros. Peneliti menyoroti pentingnya penyajian laporan keuangan yang diungkapkan sebagai persyaratan utama transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa instrumen yang melalui penyajian laporan keuangan yang baik merupakan aktor utama dalam proses transparansi pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Penelitian ini membahas pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros. Persyaratan penyajian laporan keuangan ditentukan dalam undang-undang, tidak semua dokumen anggaran yang ada harus dipublikasikan. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros disajikan lengkap yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dengan adanya ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah daerah penyajian laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Maros mengungkapkan bahwa penyajian laporan berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Maka penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros terbukti dan dapat diterima. Ini artinya, semakin baik penyajian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros.

5.2.3 Pembahasan Aksesibilitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderator

Aksesibilitas sebagai moderator memberi pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi laporan keuangan, pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan dalam pengelolaan keuangan, pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat/*stakeholder* terhadap pemerintah daerah Kabupaten Maros. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan serta membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkan.

Tesis ini menyajikan aksesibilitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Maros. Aksesibilitas laporan keuangan menjadi sangat penting sebagai moderator antara penyajian laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan. Dimana laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros diinformasikan kepada masyarakat secara jujur dan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros dipublikasikan secara terbuka.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat lebih jelas bagaimana aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator. Penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros akan dikaitkan pada aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator. Beberapa hasil diperoleh dari penelitian ini adalah peningkatan yang terjadi pada aksesibilitas mengakibatkan peningkatan yang cukup signifikan pada penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan

pemerintah daerah Kabupaten Maros dipengaruhi oleh aksesibilitas sebagai moderator. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros membuka akses kepada masyarakat secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkan. Penyajian laporan keuangan dengan aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator terhadap transparansi pengelolaan keuangan baik dan berpengaruh secara signifikan.

Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator pada penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat dikatakan masih tertutup. Dapat dilihat salah satu masalah dengan pendekatan teori keagenan yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur dalam mengatur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen. Akhirnya informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola laporan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan memperlemah pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. Aksesibilitas sebagai moderator terbukti secara signifikan dan negatif dengan kata lain adanya aksesibilitas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Kabupaten maros saat ini belum bisa memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat.

Terjadi perbedaan informasi rantai pasokan (*supply chain*) ini dapat membantu masyarakat sebagai navigasi kompleksitas rantai pasokan keuangan daerah di Kabupaten Maros. Untuk memudahkan mengidentifikasi dan menilai opsi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros untuk mengurangi resiko dan memperbaiki dampak praktik yang tidak berkelanjutan.

Dengan adanya aksesibilitas laporan keuangan dengan adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros, semua lembaga dapat memantau dan melaporkan kemajuan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros. Perbedaan dalam ketersediaan berbagai jenis informasi, berupa aksesibilitas laporan keuangan yang dimiliki oleh pihak berkepentingan yang berbeda terhadap informasi yang sama, sehingga dapat memiliki pengaruh mendalam pada cara pengambilan keputusan tentang penggunaan penyajian laporan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. sementara itu juga membentuk siapa yang paling memungkinkan untuk pengambilan keputusan.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah dapat sekaligus memperkuat atau melemahkan penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros, sehingga mampu membina kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Maros untuk menegakkan keputusan dan kepatuhan yang tergantung pada alasan mengapa dan proses

dimana informasi diungkapkan pada lembaga dan motivasi masyarakat yang terlibat.

Bukti empiris dalam penelitian ini bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah Kabupaten Maros berpartisipasi terhadap anggaran justru hasil yang didapatkan dimana aksesibilitas laporan keuangan daerah menyebabkan melemahnya penyajian laporan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros yang dalam penyusunan anggaran cenderung terjadi kesenjangan transparansi anggaran. Oleh karena itu perlu menggunakan pendekatan-pendekatan lain berupa edukasi adanya kemudahan untuk mengakses informasi, dalam melihat hubungan tersebut. Pendekatan lain meliputi penggunaan model keagenan (seperti yang telah dijelaskan bab 2.2.1 atau dengan menggunakan berbagai faktor kontinjensi sebagai prediktor adanya kesenjangan aksesibilitas laporan keuangan daerah Kabupaten Maros.

Aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator mempunyai pengaruh terhadap penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros, baik secara parcial ataupun secara bersamaan. Pemerintah Kabupaten Maros mampu menyajikan laporan keuangan yang disusun secara lengkap. Untuk aksesibilitas laporan keuangan daerah, secara keseluruhan pemerintah mampu memberi informasi laporan keuangan bagi para pengguna potensi. Namun, secara parcial masih terdapat kelemahan dalam hal aksesibilitas laporan keuangan pada kabupaten Maros. Dimana menurut pegawai negeri sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Maros akses terhadap penyajian laporan keuangan kabupaten Maros belum terlaksana secara

baik, ini dilihat dari pernyataan no. 1 dalam penyajian laporan keuangan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu dengan hasil uji tidak valid.

Aksesibilitas laporan keuangan yang lebih baik akan dapat meningkatkan penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah lebih baik pula karena kebutuhan masyarakat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros sudah dapat terpenuhi. Pola aktivitas masyarakat pada penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan aksesibilitas laporan keuangan baik dan signifikan. Konsep kebijakan penanganan aksesibilitas yang berkelanjutan pada penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan daerah merupakan konsep yang mengandalkan pada stimulasi yang diberikan kepada masyarakat berupa laporan keuangan yang akurat dan jujur. Penyajian Laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang diberikan diharapkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan memperlemah pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. Aksesibilitas sebagai moderator terbukti secara signifikan dan negatif dengan kata lain adanya aksesibilitas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten maros saat ini belum bisa memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat.

5.2.4 Pembahasan Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara simultan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros memberikan lebih banyak transparansi pengelolaan keuangan, serta memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan, tetapi secara umum, tingkat transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros masih harus meningkatkan tingkat pengungkapannya di masa mendatang. Pembuatan laporan keuangan merupakan bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah daerah Kabupaten Maros.

Kewajiban setiap entitas akuntansi yang terdaftar dalam daftar Komersial adalah untuk mempublikasikan laporan keuangan dalam Kumpulan Dokumen. Persyaratan publikasi ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat/stakeholder tentang posisi keuangan dan kinerja setiap entitas akuntansi, penelitian ini difokuskan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Penelitian ini menguji hubungan antara penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Maros. Mengklasifikasikan pengungkapan sebagai transparan jika memberikan informasi terperinci tentang laporan keuangan daerah. Pembuatan laporan keuangan merupakan bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah. Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.

Legislator biasanya mengabaikan dasar-dasar instrumental dan metodologis dari manajemen arsip. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperbarui undang-undang tentang arsip dan manajemen arsip berkenaan dengan akses ke informasi, transparansi dan akuntabilitas. Peraturan dapat memfasilitasi penggabungan kewajiban transparansi ke dalam pemerintahan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat di baca dan dipahami.

Transparansi pengelolaan yang baik tergantung kepada penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan yang baik pula. Dalam hal ini penyajian dan aksesibilitas yang bisa diberikan untuk mempermudah para pengguna laporan keuangan salah satunya *website*. Pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkan serta Laporan keuangan diinformasikan kepada masyarakat dengan jujur. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Penelitian ini berbanding lurus dengan penelitian Nurrizkiana (2017), dengan judul Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya

Terhadap Kepercayaan *Public-Stakeholders*, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, demikian pula dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan *publik-stakeholder* begitupun dengan penelitian Srairi (2019), Oxelheim (2019), Kumeh, Kyereh, Oduro, Brobbey, dan Nketiah (2019) mengenai transparansi pengelolaan keuangan.

Hal ini dapat dikatakan, bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros serta interaksi antara Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara bersama sama terbukti dan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Transparansi Pengelolah Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian mengenai efek moderator aksesibilitas laporan keuangan pada pengaruh Penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh yang signifikan penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros terbukti. Hal tersebut membuktikan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros berpengaruh terhadap Transparansi Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.
2. Ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan sebagai moderator penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Keuangan Kabupaten Maros tidak terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji regresi moderated dimana terjadi perubahan nilai uji F statistik pada regresi kedua yang melibatkan aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel moderator. Aksesibilitas laporan keuangan memperlemah pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi

pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Ini dikarenakan minimnya edukasi infrastruktur untuk mengakses informasi aksesibilitas laporan keuangan. Penelitian ini berdasarkan jawaban responden tentang persepsi mereka mengenai aksesibilitas laporan keuangan yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

3. Ada pengaruh yang signifikan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros serta interaksi antara Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara bersama sama terbukti dan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Transparansi Pengelolah Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperluas lagi sampel penelitian yaitu dengan mengambil sampel dari beberapa OPD sebagai penyaji laporan keuangan agar data yang diperoleh dapat di bandingkan antara OPD yang satu dengan OPD yang lain.
2. Bagi STIE NOBEL MAKASSAR, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan untuk melakukan penelitian berikutnya mengenai

penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan serta transparansi pengelolaan keuangan daerah lainnya.

3. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Maros, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam rangka peningkatan transparansi dalam hal penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan serta transparansi pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- AA, S., & S, B. (2016). The Going Concern Assumptions and Presentation on Financial Statements. *International Journal of Accounting Research*. <https://doi.org/10.4172/2472-114x.1000123>
- Abdullah, Z. I. B., Almsafir, M. K., & Al-Smadi, A. A.-M. (2015). Transparency and Reliability in Financial Statement: Do They Exist? Evidence from Malaysia. *Open Journal of Accounting*. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2015.44004>
- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 137–150.
- Ancok, & D. (2008). Teknik Penyusunan Skala Pengukur. *GajahMadaUniversity Press, Yogyakarta*.
- Anthony, Robert, & Govindarajan, V. (2005). *Management Control Systems*. Jakarta: Salemba Barat.
- Bandariy, H. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas). *Jurnal Eprints.Undip*, 8(2), 1–28. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/30992/1/JURNAL.pdf>
- Bokšová, J., Horák, J., & Randáková, M. (2015). Financial Statements of Companies in the Czech Republic. *Procedia Economics and Finance*. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01651-2](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01651-2)
- Casadesús de Mingo, A., & Cerrillo-i-Martínez, A. (2018). Improving records management to promote transparency and prevent corruption. *International Journal of Information Management*, 38(1), 256–261. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.09.005>
- Echdar, S. (2017). *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*. Bogor, Indonesia: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Govindarajan. (1986). Govindarajan: Universalistic and Contingency Perspective. *Decision Science* 17, 496–516.
- Greenhouse, C. J. (2013). A Moment's Notice Time Politics across Cultures. In *Cornell University Press* (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hakim. (2008). *Belajar Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadana Nusantara.
- Hanim, & Sustika. (2009). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah*

Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa). Universitas Negeri Medan.

- Ismail, & Kuppusamy, K. S. (2019). Web accessibility investigation and identification of major issues of higher education websites with statistical measures : A case study of college websites. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, (xxxx).
<https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.03.011>
- j. Nunnally. (1967). *Psychometric Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Jackson, W. A. (2009). Economics, Culture and Social Theory. In *Edward Elgar*.
<https://doi.org/10.4337/9781849802116>
- Krina, P., Loina, & Lalolo. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. *Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Kumeh, E. M., Kyereh, B., Oduro, K. A., Brobbey, L. K., & Nketiah, S. K. (2019). Transparency in the governance of landscape restoration finance: A case study of Ghana's Forest Plantation Development Fund. *Scientific African*.
<https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2019.e00185>
- Kuncoro, & Mudrajad. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Jakarta: Erlangga.
- Leuf, B. (2006). THE SEMANTIC WEB CRAFTING INFRASTRUCTURE FOR AGENCY. In *The Semantic Web: Crafting Infrastructure for Agency*.
<https://doi.org/10.1002/0470028173>
- Mardiasmo, (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Akuntansi Pemerintahan*, 1–17.
- Michael Goller. (2017). Human Agency at Work An Active Approach towards Expertise Development. In *Springer*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-18286-1>
- Morrow, P. (1983). *Concept Redundancy in Organizational Research: The Case of Work Commitment*. *Academy of Management Review*.
- Mulyana. (2006). *Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah*. Universitas Gadjah Mada.
- Mulyana, & Budi. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 56.
- Nasim, A., & Syahri Romdhon, M. R. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan

- Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 550. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6603>
- Nasution. (2010). *Nasution. 2010. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nichita, M. E., & Vulpoi, M. (2016). Relationship between risk and transparency in the financial statements of professional services entities. *Audit Financiar*, 14(137), 540. <https://doi.org/10.20869/AUDITF/2016/137/540>
- Nurhayani, H. (2013). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey Pada Seluruh Dinas Pemerintahan Kota Bandung). *JBPTUNIKOMPP*, 1(2), 42–46. Retrieved from https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-haninurhay-31943-8-unikom_h-l.pdf
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Oxelheim, L. (2019). Optimal vs satisfactory transparency: The impact of global macroeconomic fluctuations on corporate competitiveness. *International Business Review*. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.05.011>
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Maros*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. (n.d.).
- Permendagri No.13/2006 pasal 4 ayat 1*. (n.d.).
- Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 1 ayat 6*. (n.d.).
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.

<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>

- Riyadi. (2000). *Gerbang Pemasaran*. Jakarta: Gramedia.
- Romic, L. (2013). Presentation of Financial Statements. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*.
<https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20130101.11>
- Santoso, & Pandji. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Saufi, & Nasution, I. (2010). *Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara*. Universitas Negeri Medan.
- Schiff, M., & A.W. Lewin. (1970). *The Impact of People on Budgets* (The Accoun).
- Shende, & Bennet. (2004). Transparency and Accountability in Public Financial Administration. *Concept Paper 2*.
- Soesastro, Hadi, & Dkk. (2005). *. Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir:Proses Pemulihan Ekonomi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Srairi, S. (2019). Transparency and bank risk-taking in GCC Islamic banking. *Borsa Istanbul Review*. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.02.001>
- Suarez, E. D., & Castañón-Puga, M. (2013). Distributed Agency. In *United States of America* (Vol. 5). <https://doi.org/10.4018/jats.2013010103>
- Sugiono. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Cetakan kedelapan, CV Alfabet.
- Sukmadilaga, C., Pratama, A., & Mulyani, S. (2015). Good Governance Implementation in Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.068>
- Teng, F. (2018). Autonomy, Agency, and Identity in Teaching and Learning English as a Foreign Language. In *Springer*. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-0728-7>
- Umar, H. (2003). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. (n.d.).

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (n.d.).

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah (pemda). (n.d.).

Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (pasal 1 ayat 2. (n.d.).

Undang-Undang No.33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. (n.d.).

Undang Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. (n.d.).

Zehir, C., & Halil, Ş. (2016). Role Of Stakeholder Participation Between Transparency And Qualitative And Quantitive Performance Relations : An Application At Hospital Managements. 229, 234–245. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.134>

Tabel 1. PENYAJIAN LAPORAN (X1)

No	r hit	Sig	r tabel	Ket
PENYAJIAN LAPORAN (X1)				
1	0.152	0.183	0.30	Tidak Valid
2	0.322	0.004	0.30	Valid
3	0.500	0.000	0.30	Valid
4	0.616	0.000	0.30	Valid
5	0.535	0.000	0.30	Valid
6	0.336	0.000	0.30	Valid
7	0.502	0.000	0.30	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Tabel 2. AKSESIBILITAS LAPORAN (X2)

No	r hit	Sig	r tabel	Ket
AKSESIBILITAS LAPORAN (X2)				
1	0.558	0.000	0.30	Valid
2	0.573	0.000	0.30	Valid
3	0.458	0.000	0.30	Valid
4	0.516	0.000	0.30	Valid
5	0.617	0.000	0.30	Valid
6	0.524	0.000	0.30	Valid
7	0.423	0.000	0.30	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Tabel 3. TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN (Y)

No	r hit	Sig	r tabel	Ket
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN (Y)				
1	0.423	0.000	0.30	Valid
2	0.361	0.001	0.30	Valid
3	0.429	0.000	0.30	Valid
4	0.417	0.000	0.30	Valid
5	0.445	0.000	0.30	Valid
6	0.468	0.000	0.30	Valid
7	0.423	0.000	0.30	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Tabel 4. UJI REALIBILITAS DATA

X1		X2		Y	
Reliability Statistics		Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.632	8	.712	8	.627	8

REGRESI TAHAP PERTAMA

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.268 ^a	.717	.760	1.377

a. Predictors: (Constant), TX1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.269	1	11.269	5.945	.017 ^b
	Residual	145.946	77	1.895		
	Total	157.215	78			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), TX1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.159	3.458		6.986	.000
	TX1	.262	.107	.268	2.438	.017

a. Dependent Variable: Y

REGRESI MODERATOR

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.403 ^a	.862	.829	1.325

a. Predictors: (Constant), X1xX2, TX1, TX2

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	25.474	3	8.491	4.834	.004 ^b
Residual	131.741	75	1.757		
Total	157.215	78			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1xX2, TX1, TX2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-64.265	62.678		-1.025	.031
TX1	2.769	1.929	2.830	4.435	.016
TX2	2.728	1.925	3.390	4.417	.016
X1xX2	-.077	.059	-4.132	3.307	.020

a. Dependent Variable: Y

KUESIONER PENELITIAN
SOP Di Bidang PBB Dan BPHTB

Sehubungan dengan adanya penelitian dalam rangka penyusunan Tesis pada Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE Nobel Makassar, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu ASN Pemerintah Kabupaten Maros agar sudi kiranya memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/ ASN Pemerintah Kabupaten Maros berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian tesis saya. Dan saya menjamin dan bertanggung jawab atas informasi yang Bapak/Ibu berikan adalah untuk kepentingan akademis semata. Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu ASN Pemerintah Kabupaten Maros berikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

HASRIYANI
2017.MM.2.0895

Petunjuk pengisian

Cara pengisian kuesioner ini adalah dengan memilih salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu ASN Pemerintah Kabupaten Maros untuk masing-masing pertanyaan yang tersedia pada lembaran daftar kuesioner. Bapak/Ibu ASN Pemerintah Kabupaten Maros cukup memberikan tanda centang pada kolom kode jawaban yang tersedia yaitu : SS, S, RR, TS, dan STS. Adapun skor untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 Tidak Setuju (TS)

Skor 3 Ragu-Ragu (RR)

Skor 4 Setuju (S)

Skor 5 Sangat Setuju (SS)

Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

NO	DAFTAR PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X₁)						
1.	Laporan keuangan Pemda Maros memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.					
2.	Laporan Keuangan Pemda Maros dapat membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.					
3.	Laporan Keuangan Pemda Maros selalu disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.					
4.	Laporan Keuangan Pemda Maros disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.					
5.	Laporan keuangan Pemda Maros menggambarkan dengan kejuruan transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.					
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemda Maros dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.					

NO	DAFTAR PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
7.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemda Maros dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna.					
Aksesibilitas Laporan Keuangan Sebagai Moderator (X₂)						
1.	Laporan Keuangan Pemda Maros dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.					
2.	Pemda Maros memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan.					
3.	Masyarakat dapat mengakses Laporan Keuangan Pemda Maros melalui internet.					
4.	Pemda Maros memberikan akses laporan keuangan kepada masyarakat					
5.	Laporan keuangan Pemda Maros diinformasikan kepada masyarakat dengan jujur.					
6.	Pemerintah daerah Kabupaten Maros membuka akses kepada <i>stakeholder</i> secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya					
7.	Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami.					
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)						
1.	Pengelolaan Keuangan Pemda Maros diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai					
2.	Penyebarluasan laporan Keuangan Pemda Maros telah disampaikan melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.					
3.	Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan Pemda Maros.					

NO	DAFTAR PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
4.	Ada ketersediaan system informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh Pemda Maros.					
5.	Penyampaian Laporan Keuangan Pemda Maros telah melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.					
6.	Pembuatan laporan keuangan merupakan bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan (<i>openness</i>) pemerintah.					
7.	Terbuka ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik dalam hal laporan keuangan Pemerintah Daerah.					

“ TERIMA KASIH ”

Uji validitas

Correlations

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007	TX1
VAR00001	Pearson Correlation	1	-.027	-.162	.044	-.206	-.035	-.147	.152
	Sig. (2-tailed)		.816	.154	.703	.068	.763	.197	.183
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00002	Pearson Correlation	-.027	1	-.146	.078	.105	-.117	.140	.322**
	Sig. (2-tailed)	.816		.198	.492	.355	.306	.219	.004
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00003	Pearson Correlation	-.162	-.146	1	.361**	.165	.129	.119	.500**
	Sig. (2-tailed)	.154	.198		.001	.146	.257	.296	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00004	Pearson Correlation	.044	.078	.361**	1	.139	-.010	.192	.616**
	Sig. (2-tailed)	.703	.492	.001		.223	.931	.090	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00005	Pearson Correlation	-.206	.105	.165	.139	1	.107	.248*	.535**
	Sig. (2-tailed)	.068	.355	.146	.223		.347	.028	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00006	Pearson Correlation	-.035	-.117	.129	-.010	.107	1	-.088	.336**
	Sig. (2-tailed)	.763	.306	.257	.931	.347		.443	.002
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00007	Pearson Correlation	-.147	.140	.119	.192	.248*	-.088	1	.502**
	Sig. (2-tailed)	.197	.219	.296	.090	.028	.443		.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
TX1	Pearson Correlation	.152	.322**	.500**	.616**	.535**	.336**	.502**	1
	Sig. (2-tailed)	.183	.004	.000	.000	.000	.002	.000	
	N	79	79	79	79	79	79	79	79

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		VAR00009	VAR00010	VAR00011	VAR00012	VAR00013	VAR00014	VAR00015	TX2
VAR00009	Pearson Correlation	1	.415**	.083	.127	.141	.184	.142	.558**
	Sig. (2-tailed)		.000	.466	.264	.215	.104	.211	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00010	Pearson Correlation	.415**	1	.024	.127	.198	.124	.261*	.573**
	Sig. (2-tailed)	.000		.834	.264	.080	.277	.020	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00011	Pearson Correlation	.083	.024	1	.252 [†]	.162	.265*	-.077	.458**
	Sig. (2-tailed)	.466	.834		.025	.153	.018	.498	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00012	Pearson Correlation	.127	.127	.252 [†]	1	.090	.133	.094	.516**
	Sig. (2-tailed)	.264	.264	.025		.430	.241	.409	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00013	Pearson Correlation	.141	.198	.162	.090	1	.326**	.394**	.617**
	Sig. (2-tailed)	.215	.080	.153	.430		.003	.000	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00014	Pearson Correlation	.184	.124	.265*	.133	.326**	1	-.042	.524**
	Sig. (2-tailed)	.104	.277	.018	.241	.003		.713	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00015	Pearson Correlation	.142	.261*	-.077	.094	.394**	-.042	1	.473**
	Sig. (2-tailed)	.211	.020	.498	.409	.000	.713		.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
TX2	Pearson Correlation	.558**	.573**	.458**	.516**	.617**	.524**	.473**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	79	79	79	79	79	79	79	79

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		VAR00017	VAR00018	VAR00019	VAR00020	VAR00021	VAR00022	VAR00023	Y
VAR00017	Pearson Correlation	1	-.126	.122	.161	.090	.006	.080	.423**
	Sig. (2-tailed)		.267	.284	.156	.430	.960	.484	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00018	Pearson Correlation	-.126	1	-.047	-.105	-.010	.164	.026	.361**
	Sig. (2-tailed)	.267		.680	.359	.928	.149	.817	.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00019	Pearson Correlation	.122	-.047	1	.142	.125	.037	-.060	.429**
	Sig. (2-tailed)	.284	.680		.211	.272	.744	.600	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00020	Pearson Correlation	.161	-.105	.142	1	-.063	.087	.099	.417**
	Sig. (2-tailed)	.156	.359	.211		.581	.444	.385	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00021	Pearson Correlation	.090	-.010	.125	-.063	1	.028	.148	.445**
	Sig. (2-tailed)	.430	.928	.272	.581		.810	.194	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00022	Pearson Correlation	.006	.164	.037	.087	.028	1	.006	.468**
	Sig. (2-tailed)	.960	.149	.744	.444	.810		.960	.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
VAR00023	Pearson Correlation	.080	.026	-.060	.099	.148	.006	1	.423**
	Sig. (2-tailed)	.484	.817	.600	.385	.194	.960		.000
	N	79	79	79	79	79	79	79	79
Y	Pearson Correlation	.423**	.361**	.429**	.417**	.445**	.468**	.423**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	79	79	79	79	79	79	79	79

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).